PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA
ISLAM INDONESIA
CIPUTAT

V-03

INTRODUCTION TO PMII : TRANSFORMASI MAHASISWA MENJADI KADER PERGERAKAN

INTRODUCTION TO PMII: Transformasi Mahasiswa Menjadi Kader Pergerakan

copyright© PMII Cabang Ciputat All rights reserved

Ketua Editor : Satya Graha Habibilah

Angota Dewan Editor

Editor Riset : M. Qolbun Salim

Editor Layout : Adrian Roagaswara

Editor Bahasa : Rahfany Nurhidayati

Assistant Editor

Produksi dan Publikasi : Muhammad Naziri

Diterbitkan oleh **PMII Cabang Ciputat**

Komplek Dosen. Jl. Ibnu Sina I, No. 28b Ciputat, Tangerang Selatan

Cetakan I : September 2017

Cetakan II : September 2018

Cetakan III : Juli 2020

Cetakan IV : Agustus 2023

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan ataubaranghasilpelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak Oleh:

Anak Negeri

PRAKATA PENYUSUN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Tiada untaian kata indah selain panjatan syukur kehadirat Allah Swt., dengan nikmat dan karunia serta rahmat-Nya Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat masa khidmat 2023-2024, dapat menyelesaikan salah satu amanah Kaderisasi, yaitu menerbitkan Buku Modul Masa Penerima Anggota Baru (MAPABA).

Terbitnya Buku Panduan ini merupakan wujud dari komitmen kami dalam menyelaraskan dan menyeragamkan materi pengkaderan yang ada di PMII Cabang Ciputat pada tahap Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), dengan harapan terciptanya standarisasi pelaksanaan pengkaderan dari masing-masing Komisariat Cabang Ciputat serta dapat mewujudkan cita-cita bersama untuk terciptanya kader-kader yang Ulul Albab.

Buku panduan ini merupakan hasil karya ijtihad dari kader-kader PMII Cabang Ciputat sendiri, dalam rangka menyeragamkan Paradigma, Ideologi serta pemahaman anggota maupun kader PMII Ciputat tentang beberapa materi wajib dan materi tambahan dalam proses Kaderisasi Masa Penerimaan Anggota Baru.

Bermula dari kegelisahan kami dengan buku panduan yang sudah semestinya banyak diperbarui, dari bentuk fisik maupun materi-materi wajib dalam PMII dan dengan adanya perubahan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh PB PMII. Disinilah urgensi pembuatan buku panduan bagi warga PMII Cabang Ciputat sebagai pemandu dalam berjalannya proses kaderisasi agar dapat mewujudkan sistem pengkaderan sesuai dengan apa yang diharapkan pendahulu PMII Cabang

Ciputat serta melahirkan kader-kader yang siap ikhlas mengabdi untuk agama dan negeri.

Semoga dengan terbitnya buku panduan ini dapat membantu dan memudahkan proses pengkaderan dari tiap-tiap komisariat PMII Cabang Ciputat, kami sadari sebagai hamba yang tak luput dari kesalahan, buku panduan ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Segala kekurangan dan kekhilafan dalam buku panduan ini tidak membuat buku panduan ini sampai pada kata sempurna. Namun dibalik semua itu, kami tim penyusun benar-benar mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk PMII Cabang Ciputat, sehingga proses kaderisasi PMII Cabang Ciputat akan lebih baik dan melahirkan kader- kader sebagai generasi bangsa dan agama yang amanah. Aamiin.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamitthariq

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Ciputat, 25 Agustus 2023

Tim Penyusun

SAMBUTAN KETUA CABANG

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Pergerakan.! Hidup PMII.!

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Modul MAPABA PC PMII Ciputat 2023. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Adapun tujuan dari pembuatan Modul MAPABA ini secara umumnya adalah sebagai pedoman MAPABA PC PMII Ciputat 2023. Dengan hadirnya Modul MAPABA ini diharapkan dapat mempermudah para peserta dalam mempelajari, memahami, serta mengikuti proses jalannya kegiatan Mapaba dengan lancar dan maksimal.

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia mendedikasikan baik pikiran dan tenaganya selama proses perumusan dan penyusunan Modul MAPABA 2023.

Terakhir, semoga komisariat-komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat mampu menyelenggarakan MAPABA 2023 dengan optimisme tinggi, tekad kuat agar terciptanya kader *mu'takid* yang memiliki totalitas dan loyalitas atau kesetiaan terhadap organisasi.

Terciptanya kader PMII yang militan dalam memperjuangkan kebenaran sesuai dengan akidah Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan menegakkan martabat Bangsa sesuai cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tujuan PMII yang tertuang dalam AD/ART PMII Bab IV Pasal 4.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamit Thariq

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sahabat Khairul Umam

(Ketua PMII Cabang Ciputat)

DAFTAR ISI

PRAKATA PENYUSUN iii

SAMBUTAN KETUA CABANG v

DAFTAR ISI vii

A.POTRET PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAN PROFIL PMII 1

1. Latar Belakang Berdirinya PMI 3
2. Makna Nama PMII 4
3. PMII dalam Kanvas Sejarah 6
4. PMII dan NU 7
5. Menata Gerakan PMII 8
6. Independensi PMII 9
7. Periodisasi PMII 11

B. SEJARAH PMII CABANG CIPUTAT 14

1. Inisiatif Pendirian 16
2. Kondisi Sosial Politik PMII 17
3. Idealisme dan Soliditas 20
4. Penyebaran Budaya NU di Wilayah Ciputat 21
5. Profil Singkat PMII Cabang Ciputat 21

C. ISLAM DAN AHLUSSUNAH WAL JAMAAH 25

1. Islam dan Transformasi Sosial 27
2. Historisitas ASWAJA 28
   a. ASWAJA dalam GEO-SOSPOL (Genealogi Sosial Politik) Global 28
   b. ASWAJA dalam Sejarah Nusantara 32
3. Normatifitas ASWAJA dalam Pemahaman PMII 33
   a. Pergeseran Makna ASWAJA 33

b. ASWAJA sebagai Manhaj Al-Fikr dan Manhaj At-Taghayyur Al-Ijtima'i 37
c. Landasan dan Prinsip Dasar ASWAJA dalam PMII.. 38
d. Implementasi Landasan dan Prinsip Dasar ASWAJA dalam Konteks Gerakan 40
D. NILAI-NILAI DASAR PERGERAKAN (NDP) PENGERTIAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI 43
1. Pengertian 43
a. Kedudukan 43
b. Fungsi 44
c. Rumusan Nilai-Nilai Dasar PMII 44
E. KELEMBAGAAN KOPRI DAN STUDI GENDER 49
1. Sejarah Singkat 49
2. Profil KOPRI 51
3. Profil KOPRI PC PMII Ciputat 52
4. Spirit Gerakan 53
5. Pijakan Gerakan 54
a. Pendidikan 54
b. Kepemimpinan dan Politik 54
c. Ekonomi dan Pembangunan 55
d. Sosial Kultur 55
6. Lima Sikap dan Arah Gerak 56
7. Studi Gender Kajian Teoritis Seks dan Gender 56
F. KONSTITUSI PMII 60
G. ANTROPOLOGI KAMPUS 74
1. Pengertian Antropologi 74
2. Pengertian Kampus 75
3. Pengertian Antropologi Kampus 76

4. Sejarah UIN Syarif Hidayatullah JakartaIAIN With Wider Mandate 77
5. Periode UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Mulai 20 Mei 2002) 78
6. Sekolah Pascasarjana 79
7. Pola Pelaksanaan Organisasi mahasiswa 80
8. PMII dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 81
9. Sejarah Universitas Pamulang 82
10. PMII dan Universitas Pamulang 83
H. MAHASISWA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL 84
1. Pengertian Mahasiswa 84
2. Peran dan Fungsi Mahasiswa 85
3. Peran Strategis Mahasiswa 86
4. Mahasiswa dalam Peranan Perubahan 87
5. Cermin Sejarah Gerakan Mahasiswa 90
I. ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN 92
1. Dasar Organisasi 92
a. Definisi Organisasi 92
b. Model Organisasi 93
c. Karakteristik Organisasi 93
d. Prinsip-prinsip Organisasi 94
e. Manajemen Organisasi 94
f. Pola Dasar dalam Manajemen Organisasi 95
2. Dasar Kepemimpinan 96
a. Definisi Kepemimpinan 96
b. Tipe-Tipe Pemimpin 97
c. Kelebihan yang Perlu dimiliki Seorang Pemimpin 99
d. Tugas dan Tanggung Jawab Seorang Pemimpin ... 100

3. Teknik Persidangan 100
a. Definisi Teoritis 100
b. Manfaat sidang 101
c. Tujuan sidang..... 101
d. Kelengkapan Sidang..... 101
e. Kategori Sidang 104
f. Bentuk Ketukan Palu Sidang..... 105
g. Contoh Kalimat yang dipakai oleh Pimpinan Sidang.... 105
J. ATRIBUT PMII DAN LAGU-LAGU PERGERAKAN..... 106
1. Lambang PMII..... 106
a. Makna Bentuk: 107
b. Makna Warna 107
c. Penggunaan: 108
2. Bendera PMII..... 108
3. Lagu-Lagu Pergerakan 109
a. Mars PMII 109
b. Hymne PMII..... 110
c. Berjuanglah 110
d. 17 APRIL..... 111
e. Bandung..... 112
f. Ya Lal Wathon 113
SUSUNAN PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM CIPUTAT MASA KHIDMAT 2023 - 2024..... 114
1. MAJELIS PEMBINA CABANG..... 114
2. BADAN PENGURUS HARIAN (BPH)..... 114
3. BIRO-BIRO..... 115

A. POTRET PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAN PROFIL PMII

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah organisasi kemahasiswaan yang didirikan pada 21 Syawal 1379 Hijriah, bertepatan 17 April 1960 Masehi di Surabaya. Para pendiri PMII adalah aktivis-aktivis mahasiswa Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah. Para pendiri PMII adalah Cholid Mawardi, Sa'id Budairy, M. Shobic Ubaid perwakilan mahasiswa dari Jakarta; M. Makmun Syukri BA dan Hilman dari Bandung; H. Ismail Makky dan Munsif Nahrawi dari Yogyakarta; Nuril Huda Suady serta Laili Mansur dari, Surakarta; Abd. Wahab Jailani dari Semarang; Hisbullah Huda perwakilan Surabaya; M. Cholid Narbuko perwakilan mahasiswa Malang; Ahmad Husain dari Makassar. Mereka berinisiatif membuat organisasi pengkaderan untuk memajukan komunitas Nahdliyin yang nantinya akan berkontribusi memajukanbangsa Indonesia secara khusus, dan umat Islam Dunia secara umum.

Tujuan PMII adalah: membentuk "… pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada ALLAH SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia".

Atas dasar itulah PMII membakukan dan menetapkan format khidmatnya berupa,

Slogan PMII : Dzikir, Fikir dan Amal Sholeh

Motto PMII : Berilmu, Beramal dan Bertaqwa

Tri Khidmat PMII : Taqwa, IntelektualdanProfesional

Tri Komitmen PMII : Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan

Eka Citra Diri PMII : Ulul Albab

Visi PMII :

Dikembangkan dari dua landasan utama, yakni visi ke-Islaman dan visi kebangsaan. Visi Keislaman yang dibangun PMII adalah visi keIslaman yang inklusif, toleran dan moderat. Sedangkan visi kebangsaan PMII mengidealkan satu kehidupan kebangsaan yang demokratis, toleran, dan dibangun di atas semangat bersama untuk mewujudkan keadilan bagi segenap elemen warga-bangsa tanpa terkecuali.

Misi PMII :

Merupakan manifestasi dari komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, dan sebagai perwujudan kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara. Dengan kesadaran ini, PMII sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban misi intelektual berkewajiban dan bertanggung jawab mengemban komitmen ke-Islaman dan ke- Indonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan baik spiritual maupun material dalam segala bentuk.

Jelas bahwa PMII didirikan untuk menjadi wadah pengkaderan mahasiswa muslim, agar mahasiswa tidak hanya memahami disiplin ilmu yang digeluti saja tetapi juga memahami dan mengamalkan Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah, serta mempunyai kemampuan organisasi dan manajerial untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa muslim. PMII pada realitasnya juga dijadikan wadah perjuangan untuk menegakan keadilan di Indonesia.Sampai saat ini PMII mempunyai 250 kepengurusan tingkat Cabang (tingkat kabupaten/kota), 24 pengurus koordinator Cabang (provinsi/ gabungan provinsi), dan pengurus besar yang berkantor di Jl. Salemba Tengah, No. 57 A, Jakarta Pusat.

1. Latar Belakang Berdirinya PMI

Berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dilatar belakangi oleh kemauan keras para mahasiswa Nahdliyin untuk membentuk wadah organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlussunnah Wal-jamaah. Hal ini tidak terlepas dari eksistensi IPNU-IPPNU, karena secara historis PMII merupakan mata rantai dari departemen perguruan tinggi IPNU yang dibentuk pada muktamar III IPNU di Cirebon pada tanggal 27- 31 Desember 1958.

Wacana pendirian wadah yang dapat mengakomodir kebutuhan mahasiswa Nahdliyin sudah ada ketika muktamar II IPNU di Pekalongan tetapi karena keberadaan IPNU dirasa masih sangat muda yang berdiri pada tahun 1954, wacana itu tak terlalu ditanggapi dengan serius. Namun seiring dengan perkembangan dan kebutuhan mahasiswa untuk mengaktualisasikan diri, mereka terus berjuang untuk mewujudkannya. Puncak perjuangan untuk mendirikan organisasi mahasiswa Nahdliyin ini adalah ketika IPNU mengadakan konferensi besar di Kaliurang, Yogyakarta, pada tanggal 14-17 Maret 1960. Sehingga, akhirnya dibentuk tim khusus yang terdiri dari 13 orang untuk mengadakan musyawarah mahasiswa NU di Surabaya pada tanggal 14-16 April 1960, satu bulan kemudian setelah keputusan di Kaliurang.

Adapun ke-13 orang personal tersebut (pendiri organisasi PMII) adalah :

1. Cholid Mawardi (Jakarta)
2. Sa’id Budairy (Jakarta)
3. M. Shobic Ubaid(Jakarta)
4. M. Makmun Syukri BA (Bandung)
5. Hilman (Bandung)

6. Ismail Makky (Yogyakarta)
7. Munsif Nahrawi (Yogyakarta)
8. Nuril Huda Suady (Surakarta)
9. Laili Mansur (Surakarta)
10. Abd. Wahab Jailani (Semarang)
11. Hisbullah Huda (Surabaya)
12. M. Cholid Narbuko (Malang)
13. Ahmad Husain (Makassar)

Dalam musyawarah di kota pahlawan ini banyak tawaran nama yang dilontarkan untuk nama organisasi ini, yakni IMANU (Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama) usulan delegasi dari Jakarta, Persatuan Mahasiswa Sunni dari Yogyakarta, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari Bandung dan Surabaya.Dari ketiga usulan tersebut, PMII-lah yang disetujui oleh forum sebagai nama organisasi, tepat pada tanggal, 17 April 1960 (21 Syawal 1379 H) yang kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran PMII.

Semenjak kelahirannya, PMII secara struktural masih merupakan dibawah naungan NU. Karena kondisi sosial politik pada waktu itu, patronase gerakan mahasiswa masih menjadi bagian dari gerakan politik, sehingga kehadiran PMII nampaknya lebih dimaksudkan sebagai alat untuk memperkuat partai NU pada waktu itu.

2. Makna Nama PMII

Dari namanya PMII disusun dari empat kata yaitu “Pergerakan”, “Mahasiswa”, “Islam”, dan “Indonesia”. Makna “Pergerakan” yang dikandung dalam PMII adalah dinamika dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya memberikan kontribusi positif pada alam sekitarnya.

“Pergerakan” dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam kualitas kekhalifahannya.

Pengertian “Mahasiswa” adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dinamis, insan sosial, dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terpantul tanggung jawab keagamaan, intelektual, sosial kemasyarakatan, dan tanggung jawab individual baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan negara.

“Islam” yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami dengan haluan/paradigma ahlussunah wal jama’ah yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional antara iman, Islam, dan ikhsan yang di dalam pola pikir, pola sikap, dan pola perilakunya tercermin sikap-sikap selektif, akomodatif, dan integratif. Islam terbuka, progresif, dan transformatif demikian platform PMII, yaitu Islam yang terbuka, menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan. Keberbedaan adalah sebuah rahmat, karena dengan perbedaan itulah kita dapat saling berdialog antara satu dengan yang lainnya demi mewujudkan tatanan yang demokratis dan beradab.

Sedangkan pengertian “Indonesia” adalah masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah dan ideologi bangsa (Pancasila) serta UUD 45. Secara totalitas PMII sebagai organisasi merupakan suatu gerakan yang bertujuan melahirkan kader-kader bangsa yang mempunyai intergritas diri sebagaihamba yang bertaqwa kepada Allah Swt, dan atasan dasar ketaqwaan berkirah mewujudkan peran ketuhanannya membangun masyarakat, bangsa dan negara

Indonesia menuju suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam ampunan Ridho Allah SWT.

3. **PMII dalam Kanvas Sejarah**

PMII menjadi komponen muda bangsa yang selalu berperan dalam kontribusi berbagai perjalanan bangsa, semisal PMII turut menjadi salah satu kekuatan pendorong utama dalam transisi Orde lama menuju Orde baru, ditandai dengan lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) saat itu dan ketua PB PMII ialah Almarhum Zamroni yang juga menjadi Presidium KAMI yang menggelorakan perubahan di kalangan Mahasiswa saat itu. Selain itu, makna pergerakan untuk perubahan yang didorong PMII juga terlihat ketika tumbangnya Orde Baru dan tuntutan Reformasi dimana kader-kader PMII terlibat aktif didalamnya secara langsung melalui organ-organ gerakan Mahasiswa yang dibangunnya. Penguatan-penguatan wacana reformasi oleh kelompok-kelompok studi maupun dorongan kelembagaan yang keras mengkritisi hegemoni dan otoritarianisme penguasa Orde Baru.

Saat ini Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia telah menyebar di seluruh Nusantara dengan Jumlah 230 Cabang dan 24 Pengurus Koordinator Cabang (PKC). Hingga kini PMII banyak melahirkan Kader-Kader yang militan dan kini berperan dalam perkembangan Negara Dan Bangsa.Adapun Tokoh-tokoh yang Lahir dari Rahim PMII, Sahabat Muhammad Zamroni, Dr., Kh. Chotibul Umam (Salah Satu Pendiri PMII Ciputat, Musytasyar PBNU 2015-2020), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PB PMII 1994-1997, Ketua Umum PKB), Lukman Hakim (Menteri Agama 2014-2019), Imam Nahrowi (Menteri Pemuda dan Olahraga 2014-2019), Khofifah (Menteri Sosial 2104-2019), Marwan Jakfar (Menteri Desa Tertinggal 2014-2017), Hanif Dahiri (Menteri Ketenagakerjaan 2014-2019). Dan banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu-

persatu anggota DPR-RI dan lainnya sebagian besar adalah alumni Aktivis PMII. Demikian juga pada ormas terbesar di Indonesia, KH. Said Aqil Siraj yang kini memimpin PBNU dan Masyaikh lainnya.

4. PMII dan NU

PMII yang sering kali disebut dengan IndonesI An Islamic Student Movement (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) adalah anak cucu NU yang terlahir dari "kandungan" departemen perguruan tinggi "IPNU" (Ikatan Pelajar NU) juga anak NU. Status anak cucu ini pun diabadikan dalam dokumen kenal lahir yang dibuat di Surabaya tepatnya di "Taman Pendidikan Khodijah" 21 syawal 1379 Hijriah atau pada tanggal 17 April 1960 Masehi.

Meskipun begitu, bukan berarti lahirnya PMII berjalan mulus, banyak hambatan dan rintangan, hasrat mahasiswa NU untuk mendirikan memang sudah lama bergolak, namun pihak NU belum memberikan lampu hijau. Belum menganggap pentingnya didirikan organisasi sendiri untuk mewadahi anak-anak NU yang belajar di perguruan tinggi.

Namun keinginan anak-anak muda itu tak pernah lemah bahkan terus berkobar dari kampus ke kampus, realita politik pada dasawarsa 50-an memang sangat memungkinkan lahirnya organisasi baru. Banyak organisasi mahasiswa bermunculan dibawah naungan induknya. Seperti, SEMMI (dengan PSII), KMI (dengan PERTI), HMI lebih dekat dengan masyumi, IMM (dengan Muhammadiyah). Wajar jika anak-anak NU ingin mendirikan organisasi tersendiri dan bernaung dibawah panji dunia, dan benar keinginan itu diwujudkan dalam bentuk IMANU (Ikatan Mahasiswa NU) pada akhir 1955, yang diprakarsai oleh beberapa pemimpin pusat IPNU.

Pada awal gerakannya, PMII merupakan gerakan di bawah naungan NU baik secara struktural maupun fungsionarisnya, karena pada waktu itu situasi politik masih panas. Organisasi-

organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan kekuatan partai politik untuk sepenuhnya menyokong dan mendukung kemenangan sebuah partai. Reformulasi gerakan PMII kemudian dilakukan pada kongres X PMII pada tanggal, 27 oktober 1991, di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Pada kongres tersebut, keinginan untuk mempertegas kembali hubungan PMII dengan NU melahirkan pernyataan “Deklarasi Interdependensi PMII NU”.

Penegasan hubungan tersebut didasarkan pada pemikiran: adanya ikatan historisitas yang sangat erat mempertautkan PMII dan NU. Keorganisasian PMII yang independen hendaknya tidak dipahami secara sempit sebagai upaya untuk mengurangi atau menghapus arti ikatan historisitas tersebut. Adanya kesamaan paham keagamaan dan kebangsaan. Bagi PMII dan NU, keutuhan komitmen ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an merupakan perwujudan beragama dan berbangsa bagi setiap muslim Indonesia.

5. Menata Gerakan PMII

Perubahan-perubahan dalam sistem politik nasional pada akhirnya membawa dampak pada bentuk dinamika ormas-ormas, dan organ mahasiswa termasuk PMII. Sikap kritis dibutuhkan untuk mendorong para aktivis PMII secara dinamis adalah sikap yang mampu merumuskan visi, pandangan dan cita-cita mahasiswa sebagai Agent of sosial change. Pada era 1980-an PMII melakukan advokasi terhadap masyarakat serta menemukan kesadaran baru dalam menentukan pilihan dan corak gerakan.

Ada dua momentum yang ikut mewarnai pergulatan PMII di sektor kebangsaan, antara lain: penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal dan kembalinya NU ke Khittah 1926. Pada tahun 1984, PMII mampu memposisikan perananya yang cukup strategis, karena beberapa alasan, antara lain:

1. PMII memberikan prioritas terhadap pengembangan intelektualitas
2. PMII menghindari politik praktis dan bergerak di wilayah pemberdayaan civil society
3. PMII mengembangkan sikap dan paradigma kritis terhadap negara

Pada periode tahun 1985-an PMII juga melakukan reorientasi dan reposisi gerakan yang akhirnya menghasilkan rumusan Nilai Dasar Pergerakan (NDP). Sepanjang tahun 1990-an PMII telah melakukan kegiatan-kegiatan diskusi terkait dengan isu- isu penting, seperti Islam transformatif, demokrasi dan pluralisme, civil society, masyarakat komunikatif, teori kritik dan post modernisme. Seiring naiknya Gus Dur menjadi presiden keempat di Indonesia, secara serta merta aktivis PMII mengalami kebingungan, apakah gerakan civil society harus berakhir ketika Gus Dur sebagai presiden, yang selama ini menjadi tokoh dan simpul perjuangan civil society naik ke tampuk kekuasaan. Dan ketika Gus Dur dijatuhkan dari kursi presiden, paradigma yang selama ini menjadi arah gerak PMII telah patah. Paradigma ini kemudian digantikan dengan Paradigma Kritis Transformatif. Bagaimana Kita Sebagai Kader PMII harus Bersikap?

Landasan paradigmatiknya adalah paradigma kritis transformatif yang dijadikan perangkat analisa perubahan yang mencita-citakan perubahan pada semua bidang. Landasan itulah yang dijadikan acuan yang harus dimiliki oleh setiap kader PMII. Visi dan misi besar PMII harus tetap kita kawal yang nantinya menuju pada terbebasnya massa rakyat pekerja dan terciptanya tatanan masyarakat yang adil, makmur sepenuhnya.

6. Independensi PMII

Pada awal berdirinya PMII sepenuhnya berada di bawah naungan NU, dan merupakan perpanjangan tangan NU, baik

secara struktural maupun fungsional. Selanjutnya sejak dasawarsa 70-an, ketika rezim Orde Baru mulai penyederhanaan partai politik secara kuantitas, dan isu Back To Campus serta organisasi-organisasi profesi kepemudaan mulai diperkenalkan melalui kebijakan NKK/BKK, maka PMII menuntut adanya pemikiran realistis. Oleh karena itu, gerakan PMII masih cenderung berbau politik praksis. Hal terjadi hingga tahun 1972. Keterlibatan PMII dalam dunia politik praksis yang terlalu jauh dalam pemilu 1971 berakibat fatal dan terjadi kemunduran dalam segala aspek gerakannya.

Beberapa Cabang PMII di daerah pun mendapat imbas buruknya. Kondisi ini membawa pada penyadaran untuk mengkaji ulang orientasi gerakan selama ini, khususnya keterlibatan dalam dunia politik praksis. Setelah melalui perbincangan yang mendalam, maka pada musyawarah besar tanggal 14-16 juli 1972, PMII mencetuskan Deklarasi Independen di Munarjati, Lawang, Malang Jawa Timur. Deklarasi ini kemudian dikenal Deklarasi MUNARJATI. Sejak saat itu, PMII secara formal- struktural terpisah dari NU dan membuka akses sebesar-besarnya bagi PMII sebagai organisasi independen tanpa harus berpihak kepada Parpol apapun. Independensi gerakan ini terus dipertahankan dan kemudian dipertegas dalam “Penegasan Cibogo” pada tanggal, 8 Oktober 1989. Bentuk independensi merupakan respon terhadap pembangunan dan modernitas bangsa, dengan menjunjung tinggi nilai etik dan moral serta idealisme yang dijiwai oleh ajaran Islam, yakni Aswaja. Oleh karena itu, gerakan PMII masih cenderung berbau politik praksis. Hal terjadi hingga tahun 1972. Keterlibatan PMII dalam dunia politik praksis yang terlalu jauh dalam pemilu 1971 berakibat fatal dan terjadi kemunduran dalam segala aspek gerakannya.

Beberapa Cabang PMII di daerah pun mendapat imbas buruknya. Kondisi ini membawa pada penyadaran untuk mengkaji ulang orientasi gerakan selama ini, khususnya keterlibatan dalam dunia politik praksis. Setelah melalui

perbincangan yang mendalam, maka pada musyawarah besar tanggal 14-16 juli 1972, PMII mencetuskan Deklarasi Independen di Munarjati, Lawang, Malang Jawa Timur. Deklarasi ini kemudian dikenal Deklarasi MUNARJATI. Sejak saat itu, PMII secara formal- struktural terpisah dari NU dan membuka akses sebesar-besarnya bagi PMII sebagai organisasi independen tanpa harus berpihak kepada Parpol apapun. Independensi gerakan ini terus dipertahankan dan kemudian dipertegas dalam "Penegasan Cibogo" pada tanggal, 8 Oktober 1989. Bentuk independensi merupakan respon terhadap pembangunan dan modernitas bangsa, dengan menjunjung tinggi nilai etik dan moral serta idealisme yang dijiwai oleh ajaran Islam, yakni Aswaja.

7. Periodisasi PMII

PMII sejak didirikan tahun 1960, memiliki periodisasi atau kepengurusan yang dihadapkan pada tantangan kondisi dan situasi yang tidak sama antara periode satu dengan yang lain.

Ini mengingat perbedaan perubahan politik ekonomi sosial dari masa ke masa. PMII saat ini memiliki 16 Periodisasi:

1. Mahbub Djunaidi (1960-1967)

terpilih dalam Musyawarah Mahasiswa Nahdliyin, di Surabaya Jawa Timur (April 1960). Hingga tahun 1964, PMII telah berdiri di 47 Cabang se Indonesia,rata-rata PMII berdiri di kampus agama. Beliau Pernah menjabat sebagai Ketua Umum PWI pusat dan pimpinan Redaksi Harian Duta Masyarakat (1965–1967), Kolumnis Kompas,ketua dewan kehormatan PWI(1979 – 1983),Anggota DPR GR (1967-1971), Wakil Ketua PB NU (1984-1989), Wakil sekjen DPP PPP, Anggota DPR/MPR RI (1971-1982), Pencetus "Khittah Plus", serta Ketua Majelis Pendidikan Soekarno dan Musytasyar PBNU.

2. Zamroni 1967-1973

(Presidium KAMI) dua Periode, Pendiri KNPI, Partai NU, PPP, Wasekjend PBNU. Pencetus Independensi PMII, Pada zaman ini terjadi Penggulingan Orla ke Orba, PMII terlibat langsung. Pasca PMII, Zamroni bergabung di Partai NU, lalu ke PPP. Di masa Zamroni, Independensi PMII dicetuskan.

3. Abduh Paddare (1973-1977)

seorang pendiri KNPI. Abduh menolak Independensi PMII bersama Kelompok Cipayung (1973-an), namun tetap melaksanakan amanat Munas tersebut. Pasca PB PMII, Abduh aktif di Depag.

4. Ahmad Bagja (1977-1981)

KNPI, PBNU, Pasca PMII, K.H. Bagja aktif di KNPI, lalu ke PBNU.

5. Muhyidin Arubusman (1981-1985)

KNPI. PKB, Pasca PMII, Muhyidin aktif di KNPI lalu bergabung dengan PKB di era Reformasi.

6. Suryadharma Ali (1985-1988)

Hero Supermarket, GP Ansor, PPP, dan Menteri Agama. Pasca PMII, SDA menjadi Manajer Hero, lalu bergabung di GP Ansor dan PPP

7. Habib Iqbal Assegaf (1988-1991)

terpilih di Kongres IX PMII di Asrama Haji Surabaya Jawa Timur, menang dengan suara mutlak dari saingannya Syaifullah Maksum, Pasca PB PMII, Iqbal menjadi Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (1987- 1990). Anggota Pengurus Grup Diskusi Nasional (GDN) Kosgoro (1992-1994), Anggota Pokja Hankam DPP Golkar (1988-1993). Direktur Utama PT Shahanaz Swamandiri, ketua Tim Asistensi Departemen Pemenangan Pemilu DPP Golkar dan wakil ketua POKJA

Depnaker-Rabithatul Ma'ahid Islamiah (RMI), Ketua Umum PP GP ANSOR, menggantikan Slamet Effendy Yusuf.

8. Ali Masykur Musa (1991-1994)

AMM terpilih di Kongres X PMII di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Pasca PB, AMM menjabat Ketua Fraksi PKB DPR (1999-2004), serta anggota DPR / MPR RI (2004-2009).

9. Muhaimin Iskandar (1994-1997)

terpilih di Kongres XI PMII di Kutai Kertanegara Kalimantan, Masa Cak Imin, dinamika PMII cenderung meningkat bersamaan dengan memanasnya suhu politik nasional. PMII di masa ini menelurkan konsep Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran untuk menjawab tantangan zaman. Pasca PB PMII Cak Imin aktif di PKB dan hingga kini menjabat sebagai ketua umum PKB.

10. Saiful Bahri Anshari (1997-2000)

Pada Kongres kali inilah mulai muncul gejala anarkhi dari peserta kongres, seperti baku hantam dan saling lempar kursi, Pasca PB PMII, Syaiful Bahri menjadi Ketua Umum Sarbumusi dan Anggota DPR RI 2014-2019. PMII di masa ini menelurkan konsep Paradigma Kritis Transformatif.

11. Nusron Wahid (2000-2003)

Kongres XIIIPMII, Medan 2000. Nusron mengungguli pesaingnya M. Hanif Dhakiri. Pasca PB PMII, Nusron Wahid aktif di Partai Golkar dan Menjadi Anggota DPR RI 2009-2014 serta menjadi Ketua Umum GP Ansor dan Sekarang menjadi Kepala BNP2TKI.

12. Malik Haramain (2003-2005)

terpilih pada Kongres XIV PMII di Kutai Kertanegara Kalimantan, Pasca PBPMIIMalik aktifdi PKB dan menjadi Anggota DPR RI hingga sekarang.

13. Hery Haryanto Azumi (2005-2007)

PMII di masa ini menelurkan konsep Paradigma Menggiring Arus. Pasca PB PMII beliau aktif di PKB dan menjadi Wakil Sekretaris PB NU. Beliau juga turut aktif sebagai pendiri dan Sekretaris Jenderal Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) di tahun 2018 dan Saat ini beliau aktif menjadi ketua umum Forum Satu bangsa dan menjadi pembina Yayasan Menggiring Arus Dunia.

14. M. Rodli Kaelani (2008-2011)

terpilih menjadi Ketua Umum PB PMII tahun 2008-2011 pada Kongres XVI PMII di Batam.

15. Addin Jauharuddin (2011-2013)

terpilih menjadi Ketua Umum PB PMII tahun 2011-2013 pada Kongres XVII di Banjarmasin.

16. Aminuddin Ma'aruf (2014-2017)

PMII tahun Kongres XVIII di Jambi. Pasca PB PMII Aminuddin Ma'ruf kini aktif sebagai staff khusus Presiden RI.

17. Agus Mulyono Herlambang (2017- 2021)

terpilih menjadi Ketua Umum PB PMII tahun 2017 Kongres XIX di Palu Sulawesi Tengah.

18. Muhammad Abdullah Syukri (2021-Sekarang)

terpilih menjadi Ketua Umum PB PMII tahun 2020 Kongres XX di Balikpapan, Kalimantan Timur.

B. SEJARAH PMII CABANG CIPUTAT

Setelah PMII didirikan, beberapa mahasiswa yang berlatar belakang IPNU dan NU berkumpul dan sepakat untuk merencanakan pendirian PMII Ciputat. Kemudian, mereka menyebarkan formulir anggota PMII secara door to door ke mahasiswa yang tinggal di wilayah perumahan. Sebelumnya,

formulir anggota HMI sudah lebih dulu beredar di kalangan mahasiswa. Para pendiri PMII Ciputat juga termasuk yang mendapat formulir HMI, namun mereka menolak dan justru menyebar kembali formulir yang berbeda, yaitu formulir pendaftaran anggota PMII. Dari sejumlah formulir yang disebar, sebanyak 57 formulir kembali. Mereka yang mengisi formulir menyatakan bersedia menjadi anggota PMII. Sebagian dari mereka merupakan mahasiswa baru sementara sebagiannya lagi merupakan mahasiswa senior yang sudah berkeluarga.

Mereka yang menyerahkan formulir kemudian diundang dalam pertemuan Deklarasi PMII. Deklarasi dilakukan oleh Pengurus Pusat PMII yaitu Mahbub Junaidi, Kholid Mawardi, dan Fahrurrozi (ketua Cabang Jakarta dan pengurus pusat), serta dihadiri oleh aparat kepolisian, anggota organisasi kemahasiswaan lain, dan unsur IAIN. Pertemuan dan deklarasi itu dilaksanakan di dalam kampus.

Setelah dideklarasikan, tim kemudian membentuk kepengurusan PMII Ciputat, yang terdiri dari Imam Yamin selaku ketua umum, Chotibul Umam selaku wakil ketua, Ari Amnan selaku bendahara, Lamingi Lamtamzid selaku sekretaris, Abdurrahman K (dari sulawesi) selaku sekretaris, dan beberapa nama lain seperti Zuhdi Anwar, Mudzakir Jaelani, H. Rusli (imam tentara), Jamhari, Idris, selaku pengurus. Adapun Zamroni yang saat itu menjabat sebagai ketua Dewan Mahasiswa IAIN Jakarta menjabat sebagai penasihat. Sahabat Zamroni sendiri yang saat itu tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Bahasa Arab IAIN Jakarta adalah pendiri PMII Pusat pada 1960.

Alasan utama pendirian PMII adalah mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa dari kaum nahdhiyin ke dalam satu wadah organisasi. Cita-cita awal pendirian organisasi dibawah naungan NU ini bersifat idealis, meskipun kemudian berkembang tujuan pragmatis. Tujuan idealis berkenaan

dengan penyebaran dan penguatan paham ahlussunnah wal jama'ah di perguruan tinggi, terutama IAIN Jakarta. Adapun tujuan pragmatis berkisar pada keterlibatan orang-orang dalam pengelolaan IAIN Jakarta. Melalui organisasi ini, orang-orang PMII diperjuangkan untuk bisa menjadi dosen, pejabat, dan pegawai di IAIN.

Pada periode pertama, sahabat Chotibul Umam diangkat sebagai ketua umum PMII Cabang Ciputat periode 1961–1962. Untuk periode 1962–1964, sahabat Choliluddin AS diangkat sebagai ketua umum dengan sekretaris umum Ibrahim AR dan bendahara Dedy Anwar. Periode awal kepengurusan PMII Ciputat ini semasa dengan kepengurusan sahabat Said Budairi dan Cholid Mawardi di PMII Cabang Jakarta.

1. Inisiatif Pendirian

PMII Ciputat lahir pada 09 September 1960. Di antara para pendirinya adalah Zamroni (alm), Prof. Dr. K.H. Chotibul Umam, Drs. Nadjid Mukhtar, MA., Drs. Muzakkir Djaelani, Drs. Zarkasih Noor, Imam Yamin, Ari Amnan, Lamingi Lamtamzid (alm), Abdurrahman K, Zuhdi Anwar, H. Rusli, Jamhari, dan Mahmudi (alm). Pemilihan Ciputat sebagai nama Cabang dari organisasi PMII, bukan komisariat IAIN, didasarkan atas pertimbangan lokasi di mana kampus dan organisasi ini berada. Saat itu, mahasiswa yang belajar di ADIA (cikal bakal IAIN) umumnya adalah mereka yang ditugaskan belajar dari daerahnya masing-masing. Kebanyakan dari mereka adalah guru di madrasah (PGA) atau pegawai keagamaan. Latar belakang beragam, berasal dari seluruh penjuru Indonesia, dan kecenderungan paham keagamaan yang plural. Sebagian mereka berasal dari keluarga Nahdliyin dan banyak yang aktif di kegiatan Ikatan Putra Nahdlatul Ulama (IPNU).

Sebelum PMII didirikan, para mahasiswa NU tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, seperti Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU) yang didirikan pada

Desember 1955 di Jakarta dan Keluarga Mahasiswa Nahdhatul Ulama yang didirikan di Surakarta oleh Mustahal Ahmad. Namun, secara resmi organisasi kemahasiswaan untuk kader-kader NU ditampung di bawah IPNU. Di dalam struktur IPNU, ada badan atau lembaga yang khusus menghimpun mahasiswa-mahasiswa NU. PMII secara resmi didirikan di Surabaya pada 17 April 1960. Organisasi inilah yang kemudian menghimpun mahasiswa- mahasiswa dari kalangan nahdliyin. Organisasi PMII berada di bawah struktur PBNU, seperti organisasi IPNU dan Anshar. Salah satu landasan didirikannya PMII ialah, carut marutnya situasi politik bangsa Indonesia dalam kurun waktu 1950-1959 serta ketidak jelasan sistem perundang-undangan di masa pemerintahan yang panca roba pada saat itu.

2. Kondisi Sosial Politik PMII

Tujuan mengumpulkan mahasiswa berlatar belakang Nahdliyin dan mempertahankan tradisi keagamaan diwujudkan melalui kegiatan pembinaan anggota PMII. Program pembinaan anggota dilakukan secara rutin melalui kegiatan pertemuan mingguan dengan agenda utama pembacaan kitab barzanji dan tahlilan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi seputar ilmu pengetahuan, keorganisasian, dan wawasan lainnya. Untuk memperkuat silaturrahim, kegiatan tersebut dilaksanakan secara bergilir dari rumah ke rumah sesama anggota PMII.

Selain tempat kegiatan yang berpindah-pindah, terdapat tempat yang menjadi pusat kegiatan PMII. Rumah Ari Amnan (bendahara PMII periode awal) dijadikan tempat berkumpulnya pengurus dan anggota PMII. Ketika sahabat Amnan telah menyelesaikan studi, tempat ini tetap menjadi pusat kegiatan PMII, meskipun telah di tinggal oleh sang pemilik dikarenakan memenuhi panggilan tugas di daerah

asalnya. Tempat inilah yang selanjutnya menjadi Sekretariat PMII Cabang Ciputat hingga sekarang.

Dari kecil hingga besar, PMII Cabang Ciputat berdiri mendahului organisasi lain, seperti HMI dan IMM Ciputat, meskipun dari sisi persiapan sebenarnya HMI lebih siap untuk mendeklarasikan. Setelah PMII dideklarasikan, barulah HMI didirikan sebelum akhirnya IMM Cabang Ciputat juga berdiri beberapa tahun kemudian.

Dari sisi keanggotaan, PMII lebih lambat dibanding organisasi yang lain. Beberapa mahasiswa IAIN telah menjadi anggota organisasi lain yang menginduk ke Cabang Jakarta. Bisa dibilang, PMII lahir disaat organisasi lain telah lebih awal merekrut anggota. Seperti halnya anggota PMII yang umumnya berlatar belakang Nahdliyin, anggota organisasi lain juga berlatar belakang keagamaan (dan juga politik), seperti Masyumi atau Muhammadiyah. Kelahiran organisasi berbasis NU ini sempat mengagetkan anggota organisasi lain.

Di awal berdirinya, PMII Ciputat berfokus pada kegiatan pembinaan anggota masing-masing dan tidak ada ketegangan di antara mereka. Pihak kampus pun mempersilahkan organisasi mahasiswa hidup di kampus. Apalagi secara kuantitas, jumlah mahasiswa yang tidak aktif di organisasi kemahasiswaan lebih banyak ketimbang mahasiswa yang aktif. Mereka pada umumnya kurang tertatik dengan organisasi dikarenakan, mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang ditugaskan oleh daerah untuk belajar. Sedangkan mereka yang aktif di organisasi adalah mereka yang memang memiliki bakat dan kepedulian yang besar terhadap organisasi, selain bidang akademik.

Semasa Sahabat Zamroni menjadi ketua Dewan Mahasiswa IAIN Jakarta bisa dibilang tidak ada ketegangan antar-organisasi yang berarti. Ketegangan mulai muncul disaat posisi Zamroni sebagai ketua dewan mahasiswa digantikan oleh Ahmad Mudzakir yang berasal dari organisasi

yang berbeda. Ketika itu, Mudzakir sering berpidato dan menyinggung NU yang secara politik memang berseberangan dengan Masyumi. Adanya propaganda yang saling menyudutkan di antara dua kubu yang berseberangan berujung pada tindakan pengerusakan.

Ketegangan itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik nasional yakni kentestasi politik antara Masyumi dan NU yang memiliki garis politik berbeda. PMII yang menjadi organisasi dibawah NU dan HMI yang berada di bawah Masyumi juga turut terpengaruh pada dinamika politik nasional ini. Ketika Masyumi dibubarkan, HMI menjadi organisasi independen, sementara PMII tetap berada di bawah NU. Meski Masyumi telah dibubarkan, tekanan terhadap organisasi PMII oleh organisasi dibawah naungan Masyumi terus berlanjut. Tekanan itu bersifat psikis (mental) dan fisik. Bahkan, pimpinan organisasi PMII sempat diamankan dari upaya tindakan kekerasan dari organisasi lain.

Di awal berdirinya, sebagaimana disebutkan, PMII hanya beranggotakan 57 orang, bahkan dalam beberapa sumber disebutkan 7 orang (didasarkan pada inisiator yang berjumlah tujuh orang). Dalam tradisi NU, angka tujuh memang memiliki kandungan spiritual. Angka ini disebut di dalam Al-Qur'an kitab sucinya seluruh umat manusia. Hari berjumlah tujuh, langit juga tujuh, tradisi tahlilan juga memasukkan hari ketujuh, tradisi mitoni (syukuran kehamilan) dilaksanakan di bulan ketujuh, dan seorang anak telah diperintah untuk menjalankan shalat sejak berumur tujuh tahun. Itulah sakralitas angka tujuh di kalangan nahdhiyin.

Ketujuh orang anggota ini memiliki makna tersendiri di kemudian hari yang berkenaan dengan kebesaran PMII Ciputat. Dari tujuh anggota ini terus berkembang dari 17 orang, menjadi 40 orang, 57 orang, dan terus bertambah hingaa menjadi 1000 orang. Begitulah seterusnya hingga tak tercatat sampai sekarang. Bukan tak terhitung, tapi tak

tercatat, karena saking banyaknya anggota tetapi tidak teradministrasi dengan baik. Kita bisa menyebut jumlah 10.000 anggota, seperti ketika menyebut jamaah NU sebanyak 40 juta. Input anggota PMII mulai meningkat sejak tahun 1964 ketika banyak daerah yang menugaskan para kadernya belajar di IAIN Jakarta. Mahasiswa yang berasal dari daerah umumnya berlatar belakang NU sehingga lebih cocok untuk masuk di PMII ketimbang di organisasi lainnya.

3. Idealisme dan Soliditas

Mahasiswa yang masuk PMII umumnya dilandasi semangat ke- NUan. Mereka merasa bahwa identitas NU harus dipertahankan, sebagaimana telah mereka pertahankan tatkala berada di daerah masing-masing. Identitas PMII berarti identitas NU dan identitas NU adalah identitas mereka. Wajarlah ketika mahasiswa yang masuk anggota PMII bangga dengan status organisasinya. Mereka tak canggung lagi bicara NU di berbagai forum dan kesempatan.

Idealisme yang tertanam dalam jiwa sangat kuat. Tekad mereka adalah mempertahankan tradisi ke- NU-an dan memperjuangkan kelompok yang tersingkir. Garis perjuangan tidak mudah digoyah oleh kepentingan lain. Di antara bukti idealisme yang tertanam adalah ketika kader-kader NU dihina oleh kelompok lain, maka secara spontan melawan penghinaan itu. Bahkan di suatu saat, kader PMII mencoba mengklarifikasi kritikan tidak mendasar dari kelompok lain terhadap anggota dan senior PMII.

Idealisme yang mengakar mengokohkan soliditas di antara para anggota. Meski secara kuantitas termasuk minoritas, namun soliditas dan kekompakan para anggota PMII sangat terasa. Kader-kader sangat mudah untuk mengonsolidasi diri dalam berbagai kegiatan. Mereka secara suka rela terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PMII. Persoalan dana yang biasa menghambat kelancaran

organisasi tidak menjadi kendala berarti bagi lajunya roda organisasi PMII.

4. Penyebaran Budaya NU di Wilayah Ciputat

Di saat PMII Ciputat berdiri, warga muslim Ciputat dan sekitarnya sebagian besar menganut aliran politik Masyumi. Bahkan, pandangan politik umat Islam saat itu umumnya berhaluan Masyumi, karena aliran politik lainnya tidak cocok, seperti PNI dan apalagi PKI. Meski beraliran politik Masyumi, umat Islam saat itu memiliki tradisi keagamaan yang beragam, seperti NU, Muhammadiyah dan sebagainya.

Di tengah situasi ketimpangan antara pandangan politik dan kebutuhan ritual itulah kader-kader PMII hadir. Sebagian anggota PMII adalah mubaligh yang berdakwah ke kampung-kampung. Mereka mendakwahkan agama dan tradisi yang dianut oleh NU. Ternyata apa yang mereka praktikkan cocok dan sepaham dengan apa yang disampaikan oleh kader-kader PMII. Dan ternyata masyarakat juga mencari “ritual” yang sempat hilang dari pemikiran keagamaannya.

Dakwah NU membuahkan hasil. Masyarakat dengan inisiatifnya sendiri berkumpul dan mengikrarkan diri untuk meneruskan tradisi keagamaan yang selama ini telah mereka praktikkan. Pada tahap selanjutnya, organisasi-organisasi NU (dari tingkat ranting hingga Cabang) didirikan. Dakwah NU dari anggota PMII Ciputat ini menjangkau hingga wilayah Parung.

5. Profil Singkat PMII Cabang Ciputat

Nama	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat
Alamat Sekretariat	: Jl. Ibnu Sina I, No. 28b, Pisangan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Komplek Dosen UIN Jakarta, Ciputat)

Asrama Putri	: Jl. Ibnu Taimiya IV, No. 195, Komplek Dosen UIN Jakarta, Gedung Pertemuan Ciputat
Jumlah Komisariat	: Terdiri dari 12 Komisariat

- Komisariat Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan
- Komsariat Fakultas Adab dan Humaniora
- Komisariat Fakultas Usuluddin dan Perguruan Tinggi Umum
- Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum
- Komisariat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
- Komisariat Fakultas Dirasat Islamiyah
- Komisariat Fakultas Sains dan Teknologi
- Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Komisariat Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
- Komisariat Fakultas Psikologi
- Komisariat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
- Komisariat Universitas Pamulang

Ketua	: Khairul Umam
Website	: www.pmiicabangciputat.or.id

Daftar Pengurus Cabang PMII Ciputat dari Masa ke Masa

No.	Ketua Umum	Sekretaris Umum	Masa Khidmat
1.	Imam Jamin	Abdurrahman K	1960-1961
2.	Choliludin AS	A**.** Zuhdi Anwar	1961-1962
3.	Cholidludin AS	Ibrahim AR, BA	1963-1964
4.	Chozin, BA	A.Kodir H, BA	1964-1965
5.	Choliludin AS	Zabidi Ahmad, BA	1965-1966
6.	Moh. Nadjid M,	Moh. Dahlan CH	1966-1967
7.	Moh. Dahlan Ch	Maman DM	1967-1969
8.	Moh. Dahlan Ch	Mudzakir Djaelani	1969-1971
9.	Mudzakir Djaelani	Kodiri Prihatin	1971-1972
10.	Hafidz	Muhaimin AG	1972-1973
11.	Muhaimin AG	Bashori Hakim	1974-1975
12.	Ujang Effendi	Udjang Tholib	1975-1976
13.	Abdul Aziz	Ace Saifullah	1976-1977
14.	Maman Suherman	Syahid Suhandi A	1977-1978
15.	Hafidz Aswad S	Syamsuri Agus	1979-1980
16.	Ahmad Suherman	Gatot Abdullah M	1980-1981
17.	Suryadharma Ali	M. Zuher Husni	1981-1982
18.	Muchsin Ibnu D	Poppy Huriati	1982-1983
19.	Wahyu Nur Z	Iis Kholilah	1983-1984

20	Abdurrahman Mas'ud	Abdullah Tholib	1984-1985
21.	Dani Ramdani	Ujang Sidiq	1985-1986
22	Sofyan	Ujang Jamaludin	1986-1987
23	Ujang Jamaludin	Syaiful Umam	1987-1987
24	AnasTahir Attazki	Thabrani Hafiz	1988-1989
25	Nurul Yakin Ishak	Hasanudin Ibnu	1989-1990
26	Muhtadi Alawi	Nurohman	1990-1991
27.	Aceng Abdul Aziz	Taufik Amril	1992-1993
28	Ahmad Fauzi W.	Abdullah	1994-1995
29	Mukholik	M. Nahzil Q	1995-1996
30	Abdurrahman	Syaefullah S	1996-1997
31.	Ghozi Al-Fatih	Ali Ghozi	1997-1998
32	Hery Haryanto A	Rasito	1998-1999
33	M. Jamilun	Daan Dini K	1999-2000
34	M. Alamsyah HJ	M. Subhan A	2000-2001
35	M. Faidzin	Wawan SB	2003-2004
36	Ahmad Ubaid	Miftahul Khair	2004-2005
37	A.Diky Sofyan	Alfian Mujahidin	2005-2006
38	M. Sahirin	Haitami	2006-2007
39	M. Zaid	Syauqi	2007-2008

40	M. Kholis Hamdy	M. Iqbal Alam I	2008-2009
41.	Sutan Syarif H	Pradana Riyantori	2009-2011
42	Budi Purnomo	Nurdiansyah	2011-2012
43	Herman Saputra	Imam Fitra R	2012-2013
44	A.Chusanudin	Ickwan Santoso	2014-2015
45	M. Rafsanjani	Ahmad Rosyadi	2015-2016
46	Abdurrahman Wachid	Bama Pradika	2017-2018
47	Fahmi Dzakky	M. Asnawi Irzal	2018-2019
48	Ramadhan	M. Nurman. M.Y	2019-2020
49	Khairul Umam	Fernaldi Anggadha	2023-2024

C. ISLAM DAN AHLUSSUNAH WAL JAMAAH

Pada umumnya “Islam” dimengerti sebagai sebuah institusi agama dengan sekian ritual keagamaan yang dilakukan oleh para pemeluknya. Pengertian semacam ini, Islam sebagai sebuah institusi agama (organized religion) sebagaimana yang difahami oleh banyak orang, mengakibatkan makna Islam menjadi sangat eksklusif dan menutup ruang bagi institusi agama lain untuk memproklamirkan kebenaran agamanya dan ikut serta dalam kehidupan sosial- masyarakat. Bahkan bagi sebagian pemeluknya ada anggapan bahwa seseorang yang berada di luar institusi agama tertentu dianggap “musuh” dan “sesat”, karenanya harus diperangi dan diselamatkan.

Padahal kalau kita melacak makna Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an akan kita dapatkan makna yang lebih universal dan membuka ruang bagi bertemunya agama-agama (comment platform) serta kemungkinan dialog antar agama. Hal ini penting untuk menyatukan visi kemanusiaan dan keadilan sebagai upaya transformasi sosial.

Di dalam al qur'an banyak dijumpai kata Islam yang menurut djajaningrat berasal dari kata kerja aslama "menyerahkan dengan tulus hati" atau "mengikhlaskan". Dalam pengertian ini kata Islam harus dibedakan antara Islam sebagai sikap jiwa seseorang dan Islam sebagai nama sebuah agama. Surat al baqarah : 112, jinn: 14, ali imran: 19 dan al maidah : 3 menegaskan arti tersebut.

Terkait dengan pengertian Islam sebagai sikap jiwa seseorang, pemaknaan Islam yang lebih umum, menurut kata generiknya adalah pasrah, tunduk kepada tuhan, yaitu suatu semangat ajaran yang menjadikan karakteristik pokok semua agama yang benar. Dasar semacam inilah sebagaimana pandangan al qur'an bahwa semua agama yang benar adalah agama Islam, dalam pengertian semuanya mengajarkan sikap pasrah kepada tuhan.

Kata yang dekat dengan makna Islam adalah kata hanif yaitu condong atau cenderung. Islam dalam pengertian hanif inilah yang dianut dan mempunyai tali persambungan dengan ajaran Nabi Ibrahim A.S. Sedangkan ibrahim sendiri tidak pernah mendakwahkan dirinya sebagai seseorang yang memeluk agama formal baik Yahudi atau Nasrani. Ibrahim adalah seorang nabi yang tunduk dan patuh kepada tuhan karenanya dia disebut "ber-Islam".

Dengan demikian sikap pasrah dan tunduk adalah inti dari semua ajaran tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Hal ini menegaskan adanya titik temu agama-agama, meskipun nabi dan masa mereka berbeda-beda. Sebab semua yang benar itu berasal dari sumber yang sama dan semua para nabi

membawa kebenaran ajaran yang sama. Perbedaan para nabi hanyalah dalam bentuk responsi khusus tugas seorang rasul pada tuntutan zamannya.

1. Islam dan Transformasi Sosial

Manusia sebagai hamba Allah SWT, diciptakan dengan maksud untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Penghambaan penuh atas nilai absolut tuhan yang maha esa juga atas ekosistem dan alam jagat raya, selain itu manusia diwajibkan untuk melakukan komunikasi dan bersosialisasi dengan sesamanya dalam rangka untuk saling ingat-mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah atas kemungkaran.

Tugas berat yang diberikan untuk manusia tidak semata selesai di dunia saja, akan tetapi orientasi yang lebih tinggi adalah bagaimana manusia bisa hidup bahagia di akhirat kelak. Islam dalam konteks ini adalah sebagi penyelamat. Kepasrahan secara total atas ke-maha esa-an tuhan pencipta alam semesta menjadi hal yang mutlak. Sebagai agama yang diturunkan untuk penyempurna atas agama-agama sebelumnya, Islam diharapkan bisa menjadi rambu dan pedoman bagi umat manusia dalam menjaga tatanan kehidupan di dunia ini sebagai bekal di akherat (*al Islamu ya'lu wala yu'la 'alaih*).

Keberadaan Islam pada konteks masa nabi muhammad adalah sebagai seruan moral dalam memberantas kaum jahiliyah yang tidak lagimemperdulikan nilai-nilai kemanusiaan. Perjuangan besar agama Islam adalah menegakkan bagaimana agama Islam bukan hanya dimaknai sebagai ritualitas penghambaan. Tauhid sebagai bentuk kepercayaan penuh atas Allah SWT baik dalam hati, lisan maupun tindakan. Tauhid selain itu sebagaimana yang dipaparkan Hasan Hanafi bahwa tauhid bagi umat manusia ini memiliki kesamaan status, kesamaan status inilah yang seharusnya diperhatikan oleh umat manusia sehingga dalam

realitas kehidupan bermasyarakat tidak ada saling tindas menindas. Suprioritas dan pengunggulan diri berarti sama dengan menolak kesamaan status sebagai hamba Allah.

Islam sebagai agama yang memiliki nilai dalam menata dan menjadi rambu dalam umat manusia seharusnya tidak dijadikan landasan dalam melakukan perubahan di dunia. Memaknai Islam lebih dari konsteks untuk menyelesaikan sosial problem selain personal problem menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan dalam membangun kerukunan umat beragama, menyelesaikan persoalan-persoalan kerakyatan, jadi Islam bukan semata untuk mengabdikan diri kepada tuhan dengan melalaikan persoalan masyarakat, selain itu umat Islam juga seharusnya lebih memperhatikan kehancuran ekosistem (ekologi) sebagai implikasi dari kekuatan kapitalisme dalam melakukan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Mengembalikan kembali nilai-nilai Islam dalam corak dialektika material. Disamping itu membangun kembali sensitifitas sosial dengan lebih mengaplikasikan nilai-nilai ketuhanan pada realitas nyata.

Dengan pemaparan diatas, melihat konteks Islam di Indonesia, maka corak dan karakter Islam Indonesia bukan Islam ala Arab, Pakistan dll. Islam sebagi agama rohmatan lil *'alamin* mengidealkan satu corak nilai Islam Nusantara, sehingga antara nilai-nilai budaya lokal dan ajaran Islam tidak terjadi saling sandra, namun saling memberi warna tersendiri.

2. Historisitas ASWAJA

a. ASWAJA dalam GEO-SOSPOL (Genealogi Sosial Politik) Global

Perjalanan ASWAJA dalam kurun waktu sejarah peradaban masyarakat muslim tidak selamanya mulus. Meskipun dirinya hadir sebagai pemahaman ke-Islam-an yang dianggap paling sesuai dengan ajaran dan tuntunan nabi serta yang para sahabat praktikkan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana dicatat oleh para sejarawan muslim paling awal, bahwa terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 H, yang kemudian diikuti dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib oleh mayoritas kaum muslimin, ternyata menimbulkan protes keras dari Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan, salah seorang gubernur damaskus yang terhitung masih kerabat utsman. Protes kedua dilancarkan oleh "trio", Aisyah, Thalhah dan Zubair. Mereka menuduh Ali adalah orang yang paling bertanggungjawab atas tumpahnya darah Ustman. Gerakan oposisi dua kelompok diatas pada gilirannya pecah menjadi perang terbuka. Yang pertama pecah dalam perang Siffin, sedangkan yang kedua meledak dalam perang Jamal.

Dalam perang Siffin, pasukan Mu'awiyah dalam kondisi terjepit. Dan, guna menghindarkan diri dari kekalahan, mereka lantas mengajukan usulan agar pertempuran dihentikan dan diselesaikan melalui jalur arbitrase (perundingan). Strategi ini ternyata sangat menguntungkan posisi Mu'awiyah dan cukup efektif untuk memecah konsentrasi pasukan Ali. Terbukti pasukan Ali kemudian terbagi menjadi dua kelompok, disatu pihak setuju untuk menerima arbitrase (syiah), sementara dipihak lainnya menolak dan menginginkan agar pertempuran dilanjutkan sampai diketahui yang menang dan yang kalah (Khawarij). Apalagi ketika diketahui bahwa dalam arbitrase pihak Ali yang diwakili oleh Abu Musa Al-'Asy'ari secara "politis" kalah dalam berdiplomasi melawan kubu Mu'awiyah yang diwakili oleh Amru bin 'Ash, semakin mengeraskan tekad kelompok yang kontra perundingan untuk keluar dari barisan Ali.

Berdasarkan deskripsi historis tersebut dalam periode ini telah muncul partai; Ali (Syiah), Mu'awiyah dan Khawarij. Munculnya sekte-sekte keagamaan yang lebih bernuansa politis tersebut, akhirnya melahirkan trauma yang mendalam bagi sebagian umat muslim. Sikap trauma tersebut kemudian menjurus pada kenetralan, khususnya bagi warga Madinah-yang dipelopori Abdullah bin Umar. Mereka mendalami Al-

Qur'an dan memperhatikan serta mempertahankan tradisi (al-sunnah) penduduk Madinah. Sehingga dalam hal ijtihad agama kaum netralis ini bersatu dengan Syiah yang terkenal sangat hati-hati dalam menjaga sunnah. Namun dalam hal politik kaum netralis melakukan oposisi diantara Mu'awiyah dan Syiah.

Namun kaum netralis ini ternyata dalam perjalannya bergabung dengan Umayyah, meskipun juga sering melakukan oposisi dengan rezim Damaskus. Pada tahap inilah proses penyatuan golongan al-jamah (pendukung Muawiyah) dengan al-sunnah (netralis Madinah) yang kelak akan melahirkan golongan yang dinamakan ASWAJA. Karena persoalan inilah sehingga Syiah keluar dari kaum netral sebagai komitmen mereka untuk tetep berpegang teguh terhadap sunnah dan melakukan gerakan oposisi yang melakukan perlawanan terhadap rezim Damaskus dan menganggap oportunis terhadap kaum netralis. Persoalan semakin kabur manakala mencari identitas ASWAJA itu melalui wilayah teologi.

Dilihat dari aspek teologi paham ASWAJA dikonotasikan dengan Asy'ari dan Maturidi. Sedangkan teologi Mu'tazilah dan yang lainnya dipandang sebagai di luar paham ASWAJA. Lebih jauh lagi, jika suatu identitas diukur berdasarkan sejauh mana konsistensi mereka dalam memegang sendi-sendi Fiqhiyah, maka sulit sekali untuk mengatakan teologi Mu'tazilah bukan teologi ASWAJA. Mengapa? Tidak sulit untuk memberikan argumen bahwa kebanyakan tokoh Mu'tazilah adalah pengikut setia dari salah satu mazhab fiqih, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Semisal Abu Jabar yang dalam fiqhnya mengikuti Syafi'i. Data ini diperkuat lagi dengan fakta bahwa para penguasa Abbasiyah mayoritas saat itu juga mengikuti salah satu mazhab fiqh ASWAJA. Asy'ari sendiri pada mulanya adalah kader Mu'tazilah, karena kekecewaannya terhadap posisi Mu'tazilah yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan saat itu serta dipandang

telah menjadi kelompok akademisi teolog yang mengasingkan diri dari tekanan dan ketegangan waktu, juga cenderung elitis. Pikiran-pikiran yunani yang dipergunakan sudah meyimpang jauh dari agama masyarakat awam, sehingga sulit diterima masyarakat awam.

Ketegangan pemikiran atau lebih tepatnya dialektika pemikiran jelas tidak mungkin dihindari. Namun sejarah mencatat bahwa ketegangan yang lebih menjurus pada pertentangan justu terjadi antara ahlul hadis (dipelopori Hambali dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah selanjutnya oleh Abdul Wahab) dan ahli teolog (Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah). Bertolak dari argumen ini ada kemungkinan bahwa paham ASWAJA teutama dalam lapangan teologi terjadi polarisasi. Di satu sisi mincul; pemikran yang cenderung rasionalis, seperti Mu'tazilah. Namun pada saat yang sama muncul pemikiran yang ingin menyapu bersih kecendrungan rasionalistik. Kelompok kedua sering dikonotasikan dengan teologi Asy'ari. Apapun pertentangan yang muncul, kenyataan menunjukkan bahwa kelompok moderatlah yang lolos seleksi. Akhirnya kelompok rasional terpaksa minggir sebelum kemudian redup dan muncul lagi di era Muhammad Abduh (Neo-Mu'tazilah).

Kemudian teologi Asy'ari ini dikembangkan oleh filusuf sekaligus sufistik al-ghazali yang cenderung kurang rasional dan tidak terlalu monolog terhadap hadis dengan sikapnya yang sufi yang cenderung menggunakan rasa dalam menyikapi dialektika keagamaan. Dan dari tangan hujjatul muslimin inilah paham-paham tersebut menyebar ke se-antero dunia sampai sekarang.

Berdasarkan historis sederhana ini dapat tarik sebuah kesimpulan, bahwa secara garis besar pasca terjadinya perang Siffin umat muslim terpecah sehingga masing-masing membuat madzhab yang pada akhirnya mazhab-mazhab ini

dikembangkan, diformulasikan dan dibakukan oleh para kader madzhab. Dengan pembakuan-pembakuan tersebutlah, selanjutnya konsep Islam disandarkan. Adapun formulasi itu dibagi menjadi tiga yaitu Teologi, Fiqih dan Tasawuf. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain dianggap turunannya sehingga dalam wilayah metodologi selalu mengakar dan bisa dikembalikan kepada ketiga ilmu tersebut terutama pada teologi

b. ASWAJA dalam Sejarah Nusantara

Ada kesinambungan antara alur geosospol ASWAJA dengan sejarah Islam di Nusantara. Memang banyak perdebatan tentang awal kedatangan Islam di Indonesia. Ada yang berpendapat abad ke-8, ke- 11, dan ke-13 M. Namun yang pasti tonggak kehadiran Islam di Indonesia sangat tergantung kepada dua hal: pertama, kesultanan Pasai di Aceh yang berdiri sekitar abad ke-13 dan kedua, Wali Songo di jawa yang mulai hadir pada akhir abad ke-15 bersamaan dengan runtuhnya Majapahit. Namun, dalam perkembangan Islam selanjutnya yang lebih berpengaruh adalah Wali Songo yang dakwah Islamnya tidak hanya terbatas diwilayah Jawa saja tetapi menggurita ke seluruh pelosok Nusantara. Yang penting untuk dicatat pula, semua sejarahwan sepakat bahwa Wali Songo-lah yang dengan cukup brilian mengkontekskan ASWAJA dengan kebudayaan masyarakat Indonesia sehingga lahirlah ASWAJA yang khas Indonesia, yang sampai saat ini menjadi basis bagi golongan tradisionalis, termasuk PMII.

Sebagaimana termaktub dalam qonun asasi yang telah dirumuskan oleh Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari, berdasarkan seleksi beliau terhadap mazhab-mazhab yang telah diformulasikan pada zaman Abbasiyah. yaitu; "dalam ilmu aqidah / teologi mengikuti salah satu dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam *syari'ah / fiqh* mengikuti salah satu imam empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal.

Dalam tashawuf / akhlaq mengikuti salah satu dua imam: Junaid Al- Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali."

3. Normatifitas ASWAJA dalam Pemahaman PMII

a. Pergeseran Makna ASWAJA

Dalam konteks ke-Indonesia-an, *jam'iyyah* Nahdlatul Ulama' (NU) dan *Ahlussunnah Wal Jama'ah* (ASWAJA) ibarat dua sisi mata uang. Ketika menyebut NU dalam konsep kita akan terbayang imam-imam besar sebagaimana dirumuskan oleh founding father Hadratus syaikh KH. M. Hasyim Asy'ari dalam qanun asasi. Yaitu: "dalam ilmu aqidah / teologi mengikuti salah satu dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam *syari'ah/fiqh* mengikuti salah satu imam empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Dalam tashawuf/akhlaq mengikuti salah satu dua imam: Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali."

Ada dua pola pemahaman kaum muslimin terhadap A*hlussunnah wal jama'ah* (ASWAJA). Pertama, yang memahami ASWAJA identik dengan Islam dengan doktrin pemurnian (purifikasi) ajaran Islam. Kedua, yang mamahami ASWAJA sebagai "mazhab" saja. Baik pola pertama maupun kedua masing-masing mampunyai kelemahan. Yang pertama seringkali mengklain bahwa kebenaran hanya milik kelompoknya, sehingga kesan sektarianisme sulit dihindarkan. Pada level praksisnya, pengkafiran (takfir) menjadi bagian tidak terpisahkan dalam relasinya dengan non-muslim maupun dengan umat Islam tapi yang tidak satu aliran sehingga bentuk kekerasan menjadi mudah dilakukan atas dasar teks agama.

Pola mazhab juga mempunyai kecenderungan untuk menjadi institusi, dan karenanya ia menjadi kaku (jumud), karena mazhab mengandaikan kebakuan suatu pola ajaran, dan akhirnya itu semua menjadi ajaran atau doktrin yang terbakukan. Di pola nomer dua inilah mayoritas masyarakat

NU memahaminya, bahkan rumusan definitif ASWAJA tersebut dalam perkembangannya hanya dipahami dalam konteks "berfikih" dan mengikuti apa saja yang telah dihasilkan para ulama terdahulu (taklid). Lebih jauh, pada dataran praksisnya ASWAJA mengkrucut lagi menjadi mazhab fiqih Syafi'i saja dan menempatkan fiqih sebagai "kebenaran ortodoksi" yakni menundukkan realitas dengan fikih. Menyadari realitas yang demikian itu, maka ASWAJA haruslah dipahami dan direfleksikan kembali ke dalam konteks aslinya, yang sesungguhnya sangat kritis, eklektik dan analitis.

Memang tiga pola panutan qanun asasi ini dalam prakteknya tidaklah sederhana dan cenderung problematis. Apalagi ketika dirunut sejarah masing-masing ajaran disertai dengan varian-varian pemikiran para pengikutnya, semakin jelas terjadi kompleksitas gagasan bahkan terjadi pemilahan pada dua kutub yang saling berseberangan. Realitas sejarah pemikiran beserta varian-varian mazhab yang tersebut di atas, membawa kita untuk berkesimpulan bahwa ASWAJA bukanlah sebuah doktrin yang kaku, baku dan linear. Banyak sekali persoalan di dalamnya. Sehingga dalam memahami ASWAJA tidaklah cukup hanya pada produk pemikiran (mazhab) atau perkataan (qauli yang terdokumentasi dalam karya-karya) dari para mazhab-mazhab di atas, akan tetapi juga metode (manhaj) berpikir mereka dalam menyusun pemikirannya yang disesuaikan dengan konteks yang mereka hadapi. Maka qoul-qoul mazhab terutama dalam kajian fiqih yang sudah terbukukan jika dalam konteks sekarang tidak relevan bukan berarti salah, maka harus diinterpretasi ulang dan mengembalikannya ke Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian dari teks agama ini digali hukum-hukum baru dengan menggunakan metodologi imam mazhab tersebut (mazhab Minhaj) agar sesuai dengan keadaan sosial sekarang.

Ada empat ciri yang menonjol dalam memaknai ASWAJA sebagai mazhab minhaj ini. Pertama, fiqih dihadirkan sebagai etika dan interpretasi sosial bukan sebagai hukum positif

mazhab. Kedua, dalam hal metodologi mazhab tersebut di dalamnya sudah mulai diperkenalkan metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah sosial budaya. Ketiga, verifikasi terhadap mana ajaran pokok (usul) dan mana cabang (furu'). Keempat, selalu diupayakan interpretasi ulang dalam kajian teks-teks fiqih untuk mencari konteksnya yang baru.

Dengan model bermazhab seperti ini diharapkan dapat memberikan spirit baru untuk keluar dari "tempurung sakral" masa lampau dan berani memunculkan pikiran-pikiran ekspresmentatif sosial yang kreatif dan orisinil. Dalam konteks ini kreasi-kreasi ulama masa lalu tetap tidak dinafikan dan diletakkan dalam kerangka kooperatif, namun karya tersebut jangan sampai menjadi belenggu pemikiran yang mematikan. Sehingga jalan masuk untuk melakukan terobosan baru dalam setting tranformasi sosial, ekonomi politik maupun budaya menjadi lebar.

Peletakan fiqih seperti ini memunculkan problem metodologis yang sangat besar karena mazhab yang dianut masyarakat NU adalah mazhab Syafi'i. Kendati dalam qonun asasi mengakui adanya empat mazhab, namun dalam wilayah praksisnya itu tidak secara otomatis dilakukan secara eklektik karena ada rambu-rambu talfiq metodologi yang tidak mudah ditembus. Meski demikian dikalangan para kiai sepuh yang notabene nya menguasai ilmu-ilmu agama metode ini sudah diterapkan. Hal ini bisa dlihat dari adanya *bahsul masa'il* yang mencoba merumuskan pemikiran-pemikaran segar agar selalu menyesuaikan zaman. Dan seiring berkembangnya zaman mazhab minhaj ini pun dirasakan kurang menyentuh realitas. Lagi-lagi, realitas harus dijustifikasi dengan metodologi agama yang sebatas pada ketiga pola qanun asasi yaitu fiqih, teologi dan tasawuf, terutama dalam aspek fiqihnya. Pemahaman seperti ini tidak memadai untuk dijadikan pijakan gerak PMII. Sebab, pemahaman demikian cenderung

menjadikan ASWAJA sebagai sesuatu yang dalam konsep metodologi menjadi beku dan tidak bisa diotak-atik lagi.

Pemaknaannya hanya dibatasi pada metodologi ulama klasik saja. Karena secanggih apapun metodologi, selalu tergantung pada waktu dan tempat (konteks) yang dihadapinya. Padahal untuk menjadi dasar sebuah pergerakan, ASWAJA harus senantiasa fleksibel dan terbuka untuk ditafsir ulang dan disesuaikan dengan konteks saat ini dan yang akan datang. Inilah yang dinamakan sebagai metodologi yang terbuka. Oleh karena itu, interpretasi ulang terhadap konsep mazhab manhaj harus dilakukan.

Lebih jauh, implikasi yang dihasilkan dalam tatanan pola fikir dan pranata sosial yang dihadirkan dalam kehidupan orang-orang NU dianggap terlalu kaku sehingga kurang responsif terhadap tantangan dan tuntuan perkembangan zaman. Khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan persoalan hudud, hak asasi manusia, hukum public, gender dan pandangan dengan non-muslim. Meski manhaj telah dilakukan tetapi tetap saja rumusan qonun asasi khususnya fiqih tidak berani mendekati kecuali ulama-ulama yang dianggap mumpuni. Tegasnya, manhaj yang bertumpu pada keilmuan fikih yang berimplikasi pada cara pandang dan tatanan paranata sosial dalam masyarakat NU belum berani dan selalu menahan diri untuk bersentuhan dan berdialog langsung dengan ilmu-ilmu baru yang muncul pada abad ke-18 dan 19 di dataran eropa yang notabennya non-muslim, seperti antropologi, sosiologi, budaya, psikologi, filsafat dan lain sebagainya. Bahkan dari yang sesama muslim yang dianggap tidak satu mazhab seperti, Mu'tazilah Wahabi, Syiah, Khawarij, dll.

Maupun para pemikir Islam kiri seperti Hasan Hanafi, Muhammad Abduh, Muhammad Arkun, Fazlurrahman, dll. Masyarakat NU masih sangat eksklusif. Maka keterbukaan terhadap kemungkinan kontak dan pertemuan langsung

antara tradisi pemikiran keilmuan manhaj dengan keilmuan kontemporer yang telah memanfaatkan kerangka teori dan pendekatan yang digunakan oleh ilmu-ilmu sosial dan humanistik harus dilakukan. Sehingga terciptanya tatanan masyarakat yang berdimensi kemanusian yang tidak melulu berporos pada fiqih yang cendrung transdental. Ketika pola ijtihad tersebut bertemu dan berdialog maka teori, metode, dan pendekatan yang digunakan pun perlu dirubah. Jadi dalam rumusan fiqih dan kaidah usul fiqh dilakukan infilterisasi yang ketat sejauh mana ia sesuai dengan konteks zaman dan tidak bertentangan dengan paradigma gerakan dan pembaharuan yang progresif.

b. ASWAJA sebagai Manhaj Al-Fikr dan Manhaj At-Taghayyur Al-Ijtima'i

PMII memaknai ASWAJA sebagai manhaj taghayyur al *ijtima'i* yaitu pola perubahan yang berdimensi sosial-kemasyarakatan-kemanusiaan yang sesuai dengan nafas perjuangan Rasulullah yang dilanjutkan para sahabat penerusnya sampai pada era kontemporer. Yang mana metode ini tidak hanya tertumpu pada aspek fiqih dan usul fiqih saja, namun memodifikasikannya dengan keilmuan yang lain baik itu datangnya dari para pemikir muslim ataupun non-muslim dengan tetap mempertahankan dimensi historisitas dari keilmuan fiqih dan juga barang tentu teologi dan tasawuf yang disusun beberapa abad yang lalu untuk diajarkan terus menerus pada era sekarang setelah permasalahan zaman terus berevolusi.

Kemudian, rangkaian histories-empiris-fleksibilitas epistemologi dan metodologi yang sesuai situasi politik dan sosial yang meliputi masyarakat muslim waktu itu., mulai dari Rasulullah sampai manhaj at-taghayyur al-*ijtima'i* yang terbingkai dalam landasan (al-tawassuth) netral/proporsional (al-tawazun), keadilan (al-*ta'adul*) dan toleran (al-tasamuh).

Itulah yang oleh PMII dimaknai ASWAJA sebagai manhajul fikr yaitu metode berpikir yang digariskan oleh para sahabat nabi dan *tabi'in* yang sangat erat kaitannya dengan situasi politik dan sosial yang meliputi masyarakat muslim waktu itu.

Dari manhajul fikr inilah lahir pemikiran-pemikiran kelslaman baik di bidang aqidah, syari'ah, maupun akhlaq/tasawuf, dan barang tentu juga ilmu-ilmu sosial humaniora walaupun beraneka ragam tetap berada dalam satu ruh. Inti yang menjadi ruh dari ASWAJA baik sebagai manhajul fikr maupun manhaj ataghayyur al- ijtima'i adalah sebagaimana yang disabda kan oleh Rasulullah: *maana'alaihi* waashabi (segala sesuatu yang datang dari rasul dan para sahabatnya).

Jadi, benang merah yang bisa ditarik dari manhaj al-fikr para imam dan pemikir tersebut adalah sebuah metode berfikir yang "eklektik" (mencoba mencari titik temu dari sekian perbedaan dengan pembacaan jeli, sampai melahirkan tawaran alternatif). Dan posisi pemikiran mereka dalam dialektika pemikiran dan kuasa maknanya baik kebebasan berpikir, berucap, bertindak/bersikap, berhubungan, barmasyarakat, berberbangsa dan bernegara selalu terbingkai dalam landasan; (al-tawassuth) netral/proporsional (al-tawazun), keadilan (al-*ta'adul*) *amar ma'ruf nahi munkar*, istiqamah dan toleran (al-tasamuh). Argumen ini kemudian menjadi dasar pijak untuk tidak terlalu mempersoalkan apakah yang diadopsi itu barasal dari epistemologi yang berlatang belakang sebagaimana qonun asasi atau dari luar qanun asasi tersebut, seperti Mu'tazilah, Khawarij, Syiah dan lain-lainnya. Bahkan barang tentu metode ilmu- ilmu sosial humanistik yang datang dari barat. Yang dalam hal ini fokus utamanya adalah sejauh mana metodologi-metodologi itu dapat diimplementasikan secara nyata dan memberi manfaat kapada umat manusia secara universal.

c. Landasan dan Prinsip Dasar ASWAJA dalam PMII

- Tawassuth

Tawassuth bisa dimaknai sebagai berdiri ditengah, moderat, tidak ekstrim (baik ke kanan maupun ke kiri), tetapi memiliki sikap dan pendirian. Khairul umur awsathuha (moderat adalah sebaik-baik perbuatan). Tawassuth merupakan landasan dan bingkai yang mengatur bagaimana seharusnya kita mengarahkan pemikiran kita agar tidak terjebak pada pemikiran agama yang sempit dengan cara menggali dan mengelaborasi berbagai metodologi dari berbagai disiplin ilmu baik dari Islam maupun barat. Serta mendialogkan agama, filsafat dan sains.

- Tasamuh

Tasamuh adalah toleran, tepa selira. Sebuah landasan dan bingkai yang menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak dan merasa benar sendiri. Nilai yang mengatur bagaimana kita harus bersikap dalam hidup sehari-hari, khususnya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Tujuan akhirnya adalah kesadaran akan Pluralisme atau keragaman, yang saling melengkapi bukan membawa kepada perpecahan. Dalam kehidupan beragama, Tasamuh direalisasikan dalam bentuk menghormati keyakinan dan kepercayaan umat beragama lain dan tidak memaksa mereka untuk mengikuti keyakinan dan kepercayaan kita.

Dalam kehidupan bermasyarakat, Tasamuh mewujud dalam perbuatan-perbuatan demokratis yang tidak mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan bersama. Dan setiap usaha bersama itu ditujukan untuk menciptakan stabilitas masyarakat yang dipenuhi oleh kerukunan, sikap saling menghargai dan hormat-menghormati. Di berbagai wilayah, Tasamuh juga hadir sebagai usaha menjadikan perbedaan agama, negara, ras, suku, adat istiadat, dan bahasa sebagai jalan dinamis bagi perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Perbedaan itu

berhasil direkatkan oleh sebuah cita-cita bersama untuk membentuk masyarakat yang berkeadilan, keanekaragaman saling melengkapi. Unity in Diversity.

- Tawazun

Tawazun berarti keseimbangan dalam bergaul dan berhubungan, baik yang bersifat antar individu, antar struktur sosial, antara negara dan rakyatnya, maupun antara manusia dan alam. Keseimbangan di sini adalah bentuk hubungan yang tidak berat sebelah (menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain). Tetapi, masing-masing pihak mampu menempatkan dirinya sesuai dengan fungsinya tanpa mengganggu fungsi dari pihak yang lain. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya kedinamisan hidup.

- *Ta'adul*

Yang dimaksud dengan *ta'adul* adalah keadilan, yang merupakan ajaran universal ASWAJA. Setiap pemikiran, sikap dan relasi, harus selalu diselaraskan dengan landasan ini. Pemaknaan keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan sosial. Yaitu, landasan kebenaran yang mengatur totalitas kehidupan politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Sejarah membuktikan bagaimana nabi muhammad mampu mewujudkannya dalam masyarakat madinah. Bagitu juga Umar bin Khattab yang telah meletakkan fundamen bagi peradaban Islam yang agung.

Keempat landasan tersebut dalam prosesnya harus berjalan bersamaan dan tidak boleh ada dari satupun bingkai ini tertinggal. Karena jika yang satu tidak ada maka ASWAJA sebagai manhajul fikr akan pincang.

d. Implementasi Landasan dan Prinsip Dasar ASWAJA dalam Konteks Gerakan

ASWAJA sebagai manhaj fikr dan manhaj taghayyur al-*ijtima'i* bisa kita tarik dari nilai-nilai perubahan yang diusung oleh Nabi Muhammad dan para sahabat ketika merevolusi

masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang tercerahkan oleh nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan universal. Ada dua hal pokok yang menjadi landasan perubahan itu: yang pertama adalah basis epistemologi, yaitu cara berfikir yang sesuai dengan kebenaran qur'ani dan sunnah nabi yang diimplementasikan secara konsekuen dan penuh komitmen oleh para pemikir dalam historisitas ASWAJA yang terbingkai dalam enam poin tersebut.

Yang kedua adalah basis realitas, yaitu dialektika antara konsep dan realita yang selalu terbuka untuk dikontekstualkan sesuai dinamika perubahan dan lokalitas serta keberpihakan kepada kaum tertindas dan masyarakat lapisan bawah. Dua basis ini terus menjadi nafas perubahan yang diusung oleh umat Islam yang konsisten dengan ASWAJA, termasuk di dalamnya PMII. Konsistensi disini hadir dalam bentuk gerakan dinamis yang selalu terbuka untuk dikritik dan dikonstruk ulang, sesuai dengan dinamika zaman dan lokalitas. Dia hadir tidak dengan klaim kebenaran tunggal, tetapi selalu berdialektika dengan realitas, jauh dari sikap eksklusif dan fanatik.

Maka empat landasan yang dikandung oleh ASWAJA, untuk konteks sekarang harus kita tafsirkan ulang sesuai dengan perkembangan teori-teori sosial dan ideologi-ideologi dunia. Tawassuth harus kita maknai sebagai tidak mengikuti nalar kapitalisme-liberal di satu sisi dan nalar sosialisme di sisi lain. Kita harus memiliki cara pandang yang otentik tentang realitas yang selalu berinteraksi dalam tradisi. Pemaknaannya ada dalam paradigma yang dipakai oleh PMII yaitu paradigma kritis transformatif.

Walaupun dalam kerangka konseptual ASWAJA menekan pandangan yang sangat moderat, itu tidak bisa diartikan secara serampangan sebagai sikap sok bijak dan mencari selamat serta cenderung oportunis. Tetap ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam ASWAJA. Jadi misalnya,

dalam ASWAJA tidak ditekankan bentuk negara macam apa yang dibentuk: republik, federal, Islam atau apa pun. Akan tetapi bagi ASWAJA apa pun bentuk negaranya yang terpenting prinsip-prinsip di atas teraplikasikan oleh pemerintah dan segenap jajarannya. Sekaligus, ASWAJA tidak melihat apakah pemimpin itu muslim atau bukan, asalkan bisa memenuhi prinsip di atas.

Tasamuh harus kita maknai sebagai bersikap toleran dan terbuka terhadap semua golongan selama mereka bisa menjadi saudara bagi sesama. Sudah bukan waktunya lagi untuk terkotak- kotak dalam kebekuan golongan, apalagi agama. Seluruh gerakan dalam satu nafas pro-demokrasi harus bahu membahu membentuk aliansi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik, bebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. PMII harus bersikap inklusif terhadap sesama pencari kebenaran dan membuang semua bentuk primordialisme dan fanatisme keagamaan.

Tawazun harus dimaknai sebagai usaha mewujudkan egalitarianisme dalam ranah sosial, tidak ada lagi kesenjangan berlebihan antar sesama manusia, antara laki-laki dan perempuan, antara kelas atas dan bawah. Di wilayah ekonomi PMII harus melahirkan model gerakan yang mampu menyeimbangkan posisi negara, pasar dan masyarakat. Berbeda dengan kapitalisme yang memusatkan orientasi ekonomi di tangan pasar sehingga fungsi negara hanya sebagai obligator belaka dan masyarakat ibarat robot yang harus selalu menuruti kehendak pasar; atau sosialisme yang menjadikan negara sebagai kekuatan tertinggi yang mengontrol semua kegiatan ekonomi, sehingga tidakada kebebasan bagipasar dan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonominya.

Di wilayah politik, isu yang diusung adalah mengembalikan posisi seimbang antara rakyat dan negara. PMII tidak menolak kehadiraan negara, karena negara melalui pemerintahannya

merupakan implementasi dari kehendak rakyat. Maka yang perlu dikembalikan adalah fungsi negara sebagai pelayan dan pelaksana setiap kehendak dan kepentingan rakyat. Di bidang ekologi, PMII harus menolak setiap bentuk eksploitasi alam hanya semata-mata demi memenuhi kebutuhan manusia yang berlebihan. Maka, kita harus menolak nalar positivistik yang diusung oleh neo-liberalisme yang menghalalkan eksploitasi berlebihan terhadap alam demi memenuhi kebutuhan bahan mentah, juga setiap bentuk pencemaran lingkungan yang justru dianggap sebagai indikasi kemajuan teknologi dan percepatan produksi.

Ta'adul sebagai keadilan sosial mengandaikan usaha PMII bersama seluruh komponen masyarakat, baik nasional maupun global, untuk mencapai keadilan bagi seluruh umat manusia. Keadilan dalam ranah ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan seluruh ranah kehidupan. Dan perjuangan menuju keadilan universal itu harus dilaksanakan melalui usaha sungguh-sungguh, bukan sekadar menunggu anugerah dan pemberian turun dari langit. Kemudian dari keempat landasan (bingkai) dan prinsip dalam hal perubahan inilah yang menurunkan nilai-nila pergerakan.

D. NILAI-NILAI DASAR PERGERAKAN (NDP) PENGERTIAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI

1. Pengertian

Nilai-nilai dasar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah basis filosofis dari setiap aktifitas berpikir, berucap dan bertindak, yang mencerminkan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Nilai-nilai itu merupakan manifestasi pemahaman Aswaja sebagai manhaj al-fikr dan manhaj al-taghayyur al-ijtima'i dalam proses dialektika sejarah global dan ke-Indonesia-an.

a. Kedudukan

Nilai-nilai Dasar PMII berkedudukan sebagai :

- Sumber ideal moral
- Pusat argumentasi dan pengikat kebebasan berpikir, berucap,dan bertindak.

b. Fungsi

Nilai-nilai Dasar PMII berfungsi sebagai kerangka ideologis yang pemaknaannya adalah :

- Dialektika antara konsep dan realita yang selalu terbuka untuk dikontekstualkan sesuai dinamika perubahan dan lokalitas.
- Polapikir, pola sikap, polahubungan, dan pola integrasi dalam perspektif gerakan.

c. Rumusan Nilai-Nilai Dasar PMII

Tauhid (keyakinan transendental) merupakan sumber nilai yang mencakup pola hubungan antara manusia dengan Allah (hablun min Allah), hubungan manusia dengan sesama manusia (hablun min al-nas), dan hubungan manusia dengan alam (hablun min al-'alam). Pergerakan meyakini dengan penuh sadar bahwa menyeimbangkan ketiga pola hubungan itu merupakan totalitas keIslaman yang landasannya adalah wahyu Tuhan dalam al-quran dan hadits Nabi. Dalam memahami dan mewujudkan keyakinan itu PMII telah memilih Ahlussunnah wal jama'ah (aswaja) sebagai manhajul fikr dan manhaj al-taghayyur al-ijtima'i.

Selain itu sebagai bagian sah dari bangsa Indonesia, PMII menyadari bahwa Pancasila adalah falsafah hidup bangsa, yang penghayatan dan pengamalannya seiring dengan implementasi dari nilai-nilai aswaja : tawassuth, tasamuh, tawazun, dan ta'adul. Karena itu, dengan menyadari watak intelektual dan kesadaran akan tanggung jawab masa depan bersama, dan dengan memohon rahmat dan ridla Allah SWT., maka disusunlah rumusan Nilai-nilai Dasar PMII sebagai berikut :

- Hablun min Allah (Hubungan manusia dengan Allah)

Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia mencipta manusia dalam sebaik-baik bentuk dan memberikan kedudukan terhormat kepadanya di hadapan ciptaan-Nya yang lain. Kedudukan seperti itu ditandai dengan pemberian daya cipta, rasa, dan karsa. Potensi inilah yang memungkinkan manusia memerankan fungsi sebagai hamba (*'ABd*) dan wakil Tuhan di muka bumi (KHALIfATULLAH fil ARdl).

Sebagai hamba, manusia memiliki tugas utama mengabdi dan menyembah Tuhan (Q.S. al-Dzariat: 56), mengesakan Tuhan dan hanya bergantung kepada-Nya, tidak menyekutukan dan menyerupakannya dengan makhluk yang memiliki anak dan orang tua (Q.S. al-Ikhlash: 1-4). Sebagai hamba manusia juga harus mengikhlaskan semua ibadah dan amalnya hanya untuk Allah (Q.S.Shad: 82-83).

Sebagai khalifah, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan memakmurkan bumi bukan malah merusaknya (Q.S. al- Baqarah: 30). Karena, kedudukan ini merupakan amanah Tuhan yang hanya mampu dilakukan oleh manusia, sedang makhluk Tuhan yang lain tidak mampu untuk mengembannya (Q.S. al-Ahzab: 72). Dan tingkat kemampuan manusia mengemban amanah inilah yangkemudian menentukan derajatnya di mata Allah (Q.S. al-An'am: 165).

Manusia baru dikatakan berhasil dalam hubunganya dengan Allah apabila kedua fungsi ini berjalan secara seimbang. Pemaknaanseimbang di sini bahwa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhantidak cukup hanya dengan syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, tetapi nilai-nilai

ibadah itu harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, membangun peradaban umat manusia yangberkeadilan. Bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk mencarijalan keselamatan bagi diri kita saja, tetapi juga bagi orang lainterutama keluarga dan masyarakat sekitar kita.

- Hablun min al-Nas (Hubungan antar sesama manusia)

Pada hakikatnya manusia itu sama dan setara di hadapan Tuhan, tidak ada perbedaan dan keutamaan di antara satu dengan lainnya. Begitu pula tidak dibenarkan adanya anggapan bahwa laki- laki lebih mulia dari perempuan, karena yang membedakan hanya tingkat ketaqwaan (Q.S. al-Hujurat: 13) keimanan, dan keilmuawannya (Q.S. al-Mujadalah: 11).

Manusia hidup di dunia ini juga tidak sendirian tetapi dalam sebuah komunitas bernama masyarakat dan negara. Dalam hidup yang demikian, kesadaran keimanan memegang peranan penting untuk menentukan cara kita memandang hidupdan memberi makna padanya. Maka yang diperlukan pertama kali adalah bagaimana kita membina kerukunan dengan sesama Umat Islam (ukhuwah Islamiyyah) untuk membangun persaudaraan yang kekal hingga hari akhir nanti (Q.S. al-Hujurat: 11).

Namun kita hidup dalam sebuah negara yang plural dan beraneka ragam. Di Indonesia ini kita hidup bersama umat Kristen, Hindu, Budha, aliran kepercayaan, dan kelompok keyakinan lainnya. Belum lagi bahwa kitapun berbeda-beda suku, bahasa, adat istiadat, dan ras. Maka juga diperlukan kesadaran kebangsaan yang mempersatukan kita bersama dalam sebuah kesatuan cita-cita menuju kemanusiaan yang adil dan beradab

(ukhuwah wathaniyah). Keadilan inilah yang harus kita perjuangkan (Q.S. al-Maidah: 8). Dan untuk mengatur itu semua dibutuhkan sistem pemerintahan yang representatif dan mampu melaksanakan kehendak dan kepentingan rakyat dengan jujur dan amanah. Pemimpin yang sesuai dengan nilai ini, peraturannya harus kita taati selama tidak bertentangan dengan perintah agama (Q.S. al-Nisa: 58). Dan untuk pelaksanaannya kita harus selalu menjunjung tinggi nilai musyawarah yang merupakan elemen terpenting demokrasi (Q.S. Ali Imran: 199).

Namun itu saja belum cukup. Kita hidup di dunia ini berdampingan dan selalu berhubungan dengan negara-negara tetangga. Maka kita juga harus memperhatikan adanya nilai-nilai humanisme universal (ukhuwah basyariyah), yang mengikat seluruh umat manusia dalam satu ikatan kokoh bernama keadilan. Meskipun kita berbeda keyakinan dan bangsa, tidak dibenarkan kita bertindak sewenang-wenang dan menyakiti sesama. Biarkan mereka dengan keyakinan mereka selama mereka tidak mengganggu keyakinan kita (Q.S. al-Kafirun: 1-6). Persaudaraan kekal inilah sebagai perwujudan dari posisi manusia sebagai khalifah yang wajib memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bumi manusia ini.

- Hablun min al-Alam (Hubungan manusia dengan alam)

Manusia yang diberi anugerah cipta, rasa, dan karsa, yang merupakan syarat sahnya sebagai khalifah diberi wewenang dan hak untuk memanfaatkan alam bagi kebutuhan hidupnya. Namun pemanfaatan ini tidak boleh berlebih-lebihan apa lagi merusak ekosistem. Hak ini dinamakan sebagai hak isti'mar, yaitu hak untuk mengolah sumber daya alam untuk kemakmuran

makhluk hidup tetapi pengelolaan itu harus didasarkan pada rasa tanggung jawab: tanggung jawab kepada kemanusiaan, karena rusaknya alam akan berakibat bencana danmalapetaka bagi kahidupan kita semua, begitu pula tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan hak dan tanggung jawab itu.

(Q.S. Hud: 61) Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup, alam atau ekologi juga merupakan ayat Tuhan yang harus dipahami sebagaimana kita memahami al-quran. Dari pemahaman itulah akan terwujud keimanan yang mantap kepada Tuhan dan kemantapan diri sebagai manusia yang harus menyebarkan kedamaian di muka bumi. Dari pemahaman inilah akan terbentuk suatu gambaran menyeluruh terhadap alam, bahwa Tuhan menciptakan alam ini dengan maksud-maksud tertentu yang harus kita cari dan teliti.

- Tauhid

Maka dengan menyeimbangkan ketiga pola hubungan di atas kita akan mencapai totalitas penghambaan (tauhid) kepada Allah. Totalitasyangakan menjadisemangat dan ruh bagikita dalam mewarnai hidup ini, tidak semata-mata dengan pertimbangan Ketuhanan belaka, tetapi dengan pertimbangan kemanusiaan dan kelestarian lingkungan hidup. Bahwa tauhid yang kita maksudkan bukan sekadar teisme transcendental an-sich, tetapi antrophomorfisme transendental, Nilai-nilai ketuhanan yang bersatu dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Totalitas tauhid inilah yang akan memandu jalan kita dalam mencapai tujuan gerakan membangun kehidupan manusia yang berkeadilan. Rumusan Nilai-Nilai Dasar PMII perlu selalu dikaji secara kritis, dipahami secara mendalam dan dihayati secara teguh serta diwujudkan secara bijaksana. Dengan NDP ini hendak diwujudkan

pribadi muslim yang bertakwa-berilmu-beramal, yaitu pribadi yang sadar akan kedudukan dan perannya sebagai intelektual muslim berhaluan Ahlussunnah wal jama'ah di negara Indonesia yang maju, manusiawi, adil, penuh rahmat dan berketuhanan serta merdeka sepenuhnya.

E. KELEMBAGAAN KOPRI DAN STUDI GENDER

1. Sejarah Singkat

Sejarah menorehkan bahwa pergerakan perempuan tidak luput dari dinamika yang dikaitkan dengan kondisi sosial politik baik nasional maupun internasional. Isu perempuan sudah bukan isu lokal, hal ini dapat kita lihat bahwa modernisme dan persinggungan budaya merupakan hal konkret yang mengharuskan kita untuk waspada, mawas diri baik secara individu maupun komunitasnya dalam menghadapi realita yang terjadi tanpa pergi meninggalkannya. Citra laki-laki adalah makhluk kuat dan rasional sementara perempuan adalah makhluk lemah dan emosional merupakan konstruksi budaya. Citra tersebut bukanlah kodrat karena perbedaan antara laki-laki dan perempuan terletak pada biologisnya.

Kesadaran pengorganisasian isu dan SDM dalam tubuh PMII merupakan titik awal dalam membangun gerakan perempuan. PMII mengambil komitmen terhadap keadilan gender dan mewujudkannya melalui dibentuknya lembaga gerakan perempuan yang bernama Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI). KOPRI adalah badan semi otonom yang strukturnya disesuaikan dengan hirarki struktur PMII yang menangani persoalan perempuan di PMII dan isu perempuan secara umum. Lembaga ini bersifat hirarkis dan bertanggung jawab pada pleno PMII. Hubungan antara PMII dan KOPRI ditunjukkan dengan garis koordinasi dan konsultasi.

Perjalanan sejarah organisasi bernama Korps PMII Putri yang disingkat menjadi KOPRI mengalami proses yang panjang dan dinamis. KOPRI berdiri saat Kongres III PMII pada tanggal 7-11 Februari 1967 di Malang, Jawa Timur dalam bentuk Departemen Keputrian dengan berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur dan lahir bersamaan dengan Mukernas II PMII di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 25 September 1967.

Musyawarah Nasional pertama Korps PMII Putri pada Kongres IV PMII di Makasar (Ujung Pandang) pada tanggal 25-31 April 1970. KOPRI mengalami keputusan yang pahit ketika status KOPRI dibubarkan melalui voting beda satu suara pada Kongres XII di Medan tahun 2000. Pasca Kongres di Medan, kader perempuan mengalami stagnasi hingga dirumuskannya kembali wadah perempuan dalam Kongres ke XIII di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada tanggal 16-21 April 2003. Agenda tersebut dijadikan momentum yang tepat untuk memprakarsai adanya wadah perempuan, maka terbentuklah POKJA Perempuan dan kemudian lahirlah kembali KOPRI di Jakarta pada tanggal 29 September 2003. Karena semakin tajamnya semangat kader perempuan PMII maka pada Kongres di Bogor tanggal 26-31 Mei 2005 terjadi perbedaan pandangan kembali dan atas pertimbangan dan kebutuhan maka terjadi voting atas status KOPRI dengan suara terbanyak menyatakan bahwa KOPRI adalah otonom. Pada saat itu dipilih pula Ketua Umum PB KOPRI secara langsung, sehingga terpilih sahabat Ai Maryati Shalihah pada Kongres tersebut. Selanjutnya dalam Kongres Batam yang diadakan pada tanggal 27 Februari – 4 Maret 2008 melahirkan pemimpin baru, sahabat Eem Marhamah Zulfa Hiz dengan posisi sebagai lembaga semi otonom.

Perjalanan yang panjang, hasil Kongres PMII ke XVII tanggal 9-17 Maret 2011 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan memilih sahabat Irma Muthoharoh sebagai Ketua Umum

KOPRI PB PMII Periode 2011-2013, yang dipilih langsung dari semua Cabang se-Nusantara. Inilah proses regenerasi kepemimpinan KOPRI dalam rangka meneruskan cita-cita perjuangan kemahasiswaan, keIslaman, dan kebangsaan yang terbingkai dalam visi misi KOPRI PB PMII itu sendiri.

2. Profil KOPRI

Nama : Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri atau disingkat dengan KOPRI
Tahun Berdiri : 25 November 1967
Asas : Pancasila
Sifat : Keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, independensi dan profesional.

- KeIslaman adalah nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah
- Kemahasiswaan adalah sifat yang dimiliki mahasiswa, yaitu idealis, perubahan, komitmen, dan kepedulian sosial
- Kebangsaan adalah nilai-nilai yang bersumber dari kultur filosofi, sosiologi, dan yuridis bangsa Indonesia
- Kemasyarakatan adalah bersifat masuk dan menyatu dari dan untuk masyarakat.
- Independen adalah berdiri sendiri, tidak bergantung pada pihak lain baik secara perorangan maupun kelompok
- Profesional adalah distribusi tugas dan wewenang sesuai bakat, minat, kemampuan, dan keilmuan yang dimilikinya.

Visi KOPRI adalah terciptanya sinergitas KOPRI dalam mengawal dan memperkuat kepemimpinan perempuan nusantara.

Dengan misi:

- Menjadikan KOPRI sebagai kawah candradimuka (tempat pengkaderan) pemimpin perempuan nusantara
- Mentransformasikan pemahaman gender ditingkatan mahasiswa dan masyarakat
- Memperkuat simpul gerakan kader perempuan se-nusantara
- Memperkuat kaderisasi perempuan melalui peningkatan Capacity Building kader
- Mengembangkan dan memperkuat institusional KOPRI di semua level kepengurusan
- Memperluas networking di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

3. Profil KOPRI PC PMII Ciputat

KOPRI adalah sebuah badan semi otonom (BSO) yang dibentuk oleh PMII sebagai wadah proses bagi kader putri PMII. Sederhananya KOPRI adalah kawah candradimuka dan lumbung intelektual kader putri PMII. KOPRI juga memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kesamaan hak bagi kaum minoritas terlebih bagi kaum perempuan.

KOPRI PC PMII Ciputat memiliki visi *"KOPRI Leads The Golden Era of Indonesia 2045"* jelasnya, KOPRI memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan para pemimpin perempuan yang berideologikan Ahlussunnah Wal Jama'ah yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang tinggi untuk memimpin pada masa emas Indonesia di tahun 2045.

Berbicara tentang visi, KOPRI PC PMII Ciputat menyusun langkah strategis untuk berhasil mencapai visi tersebut :

- Digital Transformation, KOPRI PC PMII Ciputat mempersiapkan kader yang mampu memimpin Indonesia di era digital
- Social Transformation, KOPRI PC PMII Ciputat memiliki komitmen untuk membela kaum minoritas untuk memperjuangkan kesamaan hak dan kesetaraan.
- Quality Education, KOPRI PC PMII Ciputat mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dan mendorong kadernya untuk terus meneruskan pendidikan.
- Diversity and Inclusion, KOPRI PC PMII Ciputat memiliki nilai yang harus direalisasikan dan ditanamkan oleh setiap kader KOPRI yaitu keberagaman dan inklusivitas.

4. Spirit Gerakan

Kita masih ingat, Ratu Shima nama penguasa Kerajaan Kalingga yang pernah berdiri pada milenium pertama di Jawa. Pada masa pemerintahan Ratu Shima, Kerajaan Kalingga mencapai masa kejayaannya. Kemudian Cut Nyak Dien pernah memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Kemudian Malahayati memimpin 2.000 pasukan Inong Balee (janda-janda pahlawan yang telah tewas) untuk berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng sekaligus membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran satu lawan satu di geladak kapal. Beliau mendapat gelar Laksamana untuk keberaniannya ini, sehingga kemudian ia lebih dikenal dengan Laksamana Mal.

Perempuan lain yakni Martha Christina tercatat sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang unik yaitu seorang putri

remaja yang langsung terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dalam perang Pattimura tahun 1817. Di Sulawesi Selatan ada Retni Kencana Colliq Pujie yang merupakan intelektual penggerak zaman. Di kalangan pejuang dan masyarakat sampai di kalangan musuh, ia dikenal sebagai gadis pemberani. KOPRI banyak belajar dari kepemimpinan dan kegigihannya dalam membangun bangsa.

5. Pijakan Gerakan

Gerakan KOPRI harus berpijak pada realitas perempuan di berbagai sektor diantaranya:

a. Pendidikan

Bagi bangsa yang sedang berkembang seperti Indonesia, memberdayakan perempuan melalui pendidikan adalah aset bangsa. Laporan Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa jumlah perempuan buta aksara sekitar 6,3 juta orang, sekitar 70 persen diantaranya berusia diatas 45 tahun. Adapun jumlah laki-laki buta aksara sebanyak 3,4 juta orang. Total jumlah warga buta aksara 9,7 juta atau 5,97% dari jumlah penduduk Indonesia.

b. Kepemimpinan dan Politik

Dalam pemilu 1999, perempuan DPR RI hanya 8%. Kemudian pada pemilu 2004 dengan pasal 65 (1) UU 12/2002 memuat kuota pencalegan perempuan hanya mampu mendongkrak perempuan di DPR RI 11,3%,tapi untuk DPD mencapai 21%.Pemilu 2009,

UU Pemilu, UU Parpol, dan UU Penyelenggaraan Pemilu memuat tentang keterwakilan perempuan minimal 30% mampu mendongkrak perempuan di DPR RI menjadi 18% dan DPD RI sampai 28%.

c. Ekonomi dan Pembangunan

Sementara itu pertumbuhan ekonomi akan memacu pertumbuhan industri dan peningkatan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup. Sebagai salah satu aset dan potensi bangsa, kaum perempuan bukanlah suatu beban atau hambatan dalam pembangunan. Oleh sebab itu, masyarakat pun perlu mengubah pola pikir yang lebih mengutamakan laki-laki sebagai penggerak pembangunan. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPSK) laki-laki masih tinggi (86,5%) dari perempuan (50,2%). Hal di atas berimbas juga pada perbedaan pendapatan perempuan yang masih lebih rendah daripada laki-laki.

d. Sosial Kultur

Pengaruh budaya patriarki bisa diminimalisir dan dihilangkan tentunya dengan cara mewujudkan apa yang disebut sebagai kesetaraan gender. Hal tersebut terwujud apabila kita bisa membangun kesepahaman kita tentang gender itu sendiri. Dimana konsep tersebut atau konstruksi sosial yang mengacu pada hubungan sosial membedakan fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki bukan atas perbedaan biologis atau kodrat. Tetapi dasarnya adalah sistem sosial dalam suatu masyarakat, mulai dari ideologi politik maupun ekonomi sosial budayanya. Sehingga pemahaman gender bukan sebagai suatu paket pengetahuan yang tunggal dan superior namun tetap harus berpijak dengan

kearifan lokal. Sosial kultur dan KOPRI adalah Gerakan yang tidak bisa dipisahkan. KOPRI sendiri lahir karena keresahan terhadap situasi perempuan baik itu di organisasi maupun sistem masyarakat.

6. Lima Sikap dan Arah Gerak

Pertama, Mengawal kepemimpinan gerakan perempuan di berbagai sektor, melalui peningkatan pembangunan kapasitas kepemimpinan, teknik advokasi, dan jurnalistik di tingkatan kader perempuan PMII.

Kedua, Menjadi pusat gerakan perempuan mahasiswa Indonesia. Hal ini berangkat dari realitas perempuan OKP (Cipayung) yang sama-sama sedang menggalang dan mengkonsolidasikan diri di masing-masing organisasi agar dapat melahirkan kader terbaiknya untuk negeri.

Ketiga, Membangun kekuatan jaringan dalam pengawasan isu. Kekuatan pertama adalah membangun kekuatan lintas OKP, lintas organisasi perempuan dan ormas.

Keempat, Mengawal proses penyadaran berkeadilan gender di kalangan mahasiswa dan masyarakat.

Kelima, Memperjuangkan lahirnya kebijakan yang berspektif gender berlandaskan nilai-nilai keadilan dan penghargaan. Mengawal segala bentuk diskriminasi perempuan melalui kebijakan publik, UU, dan PERDA.

7. Studi Gender Kajian Teoritis Seks dan Gender

Oleh: Siti Ummul Khoir Saifullah (Ketua Bidang II KOPRI PC PMII Ciputat 2023-2024)

Salah satu isu global yang sampai saat ini masih hangat diperbincangkan yakni isu gender. Untuk dapat memahami konsep gender, maka perlu juga memahami konsep seks. Konsep gender dan seks adalah konsep yang berbeda, namun keduanya sering menimbulkan pemaknaan yang keliru di masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan gender. Oleh karena itu, pemahaman konsep seks dan gender sangat penting dimiliki oleh seluruh kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) agar dapat melawan segala bentuk ketidakadilan gender. Melawan ketidakadilan gender adalah wujud menciptakan kehidupan bangsa yang aman, adil, dan setara.

Seks (jenis kelamin) merupakan perbedaan biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu dan pemberian dari Tuhan. Misalnya, laki-laki adalah manusia yang mempunyai penis, jakala (kala menjing), dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut melekat dan tidak bisa dipertukarkan, atau sering dikatakan sebagai kodrat/ketentuan Tuhan.

Gender merupakan perbedaan peran, nilai, perilaku, karakteristik emosional, dan karakter antara laki-laki dengan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat. Misalnya, perempuan dikenal sebagai manusia yang lemah lembut, cantik, keibuan, dan emosional. Sedangkan laki-laki dikenal sebagai manusia yang kuat, jantan, perkasa, dan rasional. Ciri dan sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan. Artinya, ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa, sementara itu, ada pula laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan keibuan.

Gender ini bersifat relatif dan kontekstual. Gender yang dikenal dengan orang Jawa berbeda dengan yang dikenal orang Minang atau Bali. Gender berbeda dengan seks yang sifatnya kodrati. Gender bukanlah sesuatu yang kodrati, artinya dapat mengalami perubahan dari masa ke masa, dari tempat ke tempat lain, juga dapat berubah dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Segala hal yang dapat dipertukarkan sifat perempuan dan laki-laki dan bisa berubah, itulah yang dikenal dengan konsep gender.

Perhatikan tabel berikut untuk melihat perbedaan seks dan gender!

SEKS	GENDER
Biologis	Kultural
Pemberian Tuhan	Diajarkan melalui sosialisasi
Tidak dapat diubah	Dapat diubah
Dibawa sejak lahir	Dibentuk oleh masyarakat
Berlaku dimanapun dan kapanpun	Berbeda karena tempat, kebiasaan, dan adat istiadat
Peran seks	**Peran gender**

Laki-laki: produksi (menghasilkan sperma, mempunyai penis) Perempuan: reproduksi (mempunyai rahim, vagina, dan payudara)	Mencari nafkah, sebagai kepala rumah tangga, mendidik anak, memasak, bekerja di luar rumah, menjadi tenaga profesional, dsb.

Gender dan Ketidakadilan Gender

Sejarah perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang. Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikontruksi secara sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos, seolah-olah menjadi kyakinan. Oleh karena itu, perbedaan gender di masyarakat dianggap sebagai ketentuan Tuhan, seolah-olah tidak dapat diubah lagi dan sudah menjadi kodrat perempuan dan kodrat laki-laki.

Dewasa ini yang menjadi permasalahan adalah pemahaman yang tidak sesuai; konstruksi sosial dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Misalnya, mendidik anak, memasak, dan mengerjakan pekerjaan rumah, atau urusan domestik sering dianggap sebagai ‘kodrat perempuan’. Padahal, hal tersebut adalah konstruksi kultural dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu, boleh jadi urusan mendidik anak atau urusan domestik bisa dilakukan oleh laki-laki. Sebab, pekerjaan tersebut dapat dipertukarkan.

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah selagi tidak melahirkan ketidakadilan. Akan tetapi, pada kenyataannya, perbedaan tersebut melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan, baik terhadap laki-laki, dan terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan gender adalah ketidakadilan yang bersumber dari gender. Ketidakadilan

tersebut termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Meski ketidakadilan gender bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan, akan tetapi pada kenyataannya, perempuan adalah korban yang paling banyak dari sistem ketidakadilan gender ini.

Pemahaman konsep gender dan seks ini perlu dimiliki seluruh kader PMII secara komprehensif agar kader PMII tidak menjadi pelaku ketidakadilan dan baik kader laki-laki maupun perempuan dapat saling bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang setara dan adil.

F. KONSTITUSI PMII

Kata "konstitusi" seringkali terdengar, digunakan, atau bahkan menjadi topik utama dalam perbincangan sehari-hari. Namun, sejauh mana pemahaman kita tentang konstitusi dan mengapa penting untuk memiliki konstitusi? Dalam arti bahasa, konstitusi mengacu pada himpunan aturan, sumber hukum, dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk suatu kelompok atau golongan tertentu. Dalam konteks istilah, konstitusi merujuk pada peraturan yang dimiliki oleh suatu golongan atau organisasi tertentu, yang telah disepakati bersama oleh anggota-anggota golongan atau organisasi tersebut.

Konstitusi memiliki peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dan menjadi suatu keharusan yang harus dijaga dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Konstitusi diperlukan karena dalam praktik pengelolaan organisasi, harus ada batasan-batasan dan dasar hukum yang mengatur agar organisasi tetap berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Hal ini juga berlaku untuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). PMII sebagai organisasi memiliki aturan-aturan yang mengikat bagi semua anggotanya yang menggunakan PMII sebagai wadah untuk berdiskusi dan mengembangkan potensi diri.

Dalam PMII, terdapat berbagai bentuk aturan yang tertulis dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Organisasi (PO), Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO), serta Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK). Semua bentuk aturan ini secara umum disebut sebagai KONSTITUSI. Konstitusi berfungsi sebagai dasar dan panduan bagi PMII dalam menjalankan prosesnya agar tidak tersesat. Meskipun begitu, tantangan dan cobaan yang besar seringkali membuat orang menjadi lengah, sehingga aturan yang seharusnya diikuti bersama sering dilanggar. Inilah fungsi sebenarnya dari konstitusi. Sebab, aturan-aturan ini mengikat setiap anggota atau kader dalam PMII. Jika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi, sanksi tegas sesuai dengan aturan yang ditetapkan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, adalah hal yang wajar dilakukan.

Penyusunan dan pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam PMII dilakukan secara bersama-sama oleh para kader dalam forum tertinggi organisasi PMII yang disebut Kongres. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari semua cabang PMII di Indonesia. Dengan adanya penyusunan AD/ART ini, diharapkan setiap anggota dan kader memiliki pemahaman yang jelas dan terperinci dalam menginterpretasikan PMII dari segi keorganisasian. Dalam AD/ART ini, kita dapat mengetahui tujuan dan karakter organisasi secara struktural dan fungsional, termasuk lembaga-lembaga yang ada di dalamnya dan hal-hal lain yang terkait dengan PMII.

Dalam bab ini, kami berupaya menjelaskan secara komprehensif mengenai isi dan makna dari Konstitusi PMII. Melalui bab ini, diharapkan para anggota PMII Cabang Ciputat dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari organisasi ini. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap Konstitusi PMII, diharapkan semangat pergerakan

dan cita-cita luhur PMII dapat terus berkobar dan menerangi jalan bagi kemajuan bangsa dan umat.

PMII berlandaskan pada Pancasila (lihat AD BAB II, ASAS, PASAL 2) dan berpegang teguh pada Ahlusssunnah waljama'ah, bertujuan untuk menghasilkan pribadi muslim Indonesia yang taqwa kepada Allah SWT, memiliki budi pekerti yang mulia, berpengetahuan, berkompeten, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan pengetahuannya. Selain itu, organisasi ini juga berkomitmen untuk berjuang demi mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, PMII berusaha terus menghimpun golongan pemuda (mahasiswa) sebagai generasi penerus yang akan membawa bangsa ini maju ke depan, dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang mendukung perkembangan insan ulul albab yang kritis dan intelektual organik-cerdas serta berperan aktif dalam masyarakat. PMII menerapkan berbagai jenis pengkaderan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengkaderan di PMII mencakup tiga variasi (lihat AD Bab VI, Sistem Kaderisasi, Pasal 7). Pertama, pengkaderan secara formal yang melibatkan serangkaian proses, seperti MAPABA (Masa Penerimaan Anggota Baru), PKD (Pelatihan Kader Dasar), PKL (Pelatihan Kader Lanjutan), dan PKN (Pelatihan Kader Nasional). Selanjutnya, terdapat pengkaderan informal yang melibatkan kader PMII dalam kepanitiaan setiap kegiatan organisasi, seperti penyelenggaraan pelatihan-pelatihan (seperti pelatihan gender, filsafat, seminar, dan lain-lain). Selain itu, terdapat juga pengkaderan non formal, seperti kajian rutin dan kegiatan ngopi ilmiah, serta banyak kegiatan lainnya. Semua proses pengkaderan ini berperan penting dalam membentuk pribadi-pribadi yang siap berkontribusi dalam cita-cita PMII.

Struktur keorganisasian PMII (lihat AD Bab VII, Struktur Organisasi, pasal 9) dan item-item lainya adalah sebagai berikut:

1. Pengurus Besar (PB)
2. Pengurus Koordinator Cabang (PKC)
3. Pengurus Cabang (PC) dan atau Pengurus Cabang Internasional (PCI)
4. Pengurus Komisariat (PK)
5. Pengurus Rayon (PR)

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan persyaratan menjadi pengurus, Anda dapat merujuk pada Anggaran Rumah Tangga (ART) Bab VIII yang berisi tentang susunan pengurus, tugas dan wewenang pengurus, serta persyaratan pengurus. Informasi tersebut dapat ditemukan pada Pasal 18-23 dalam dokumen ART tersebut.

Adapun dalam hal berdiskusi atau merencanakan agenda-agenda seperti pemilihan ketua, pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), serta mengatasi permasalahan internal dan eksternal, PMII memiliki berbagai bentuk mekanisme musyawarah yang khas, antara lain:

Kongres

1. Kongres merupakan forum musyawarah tertinggi dalam organisasi.
2. Kongres dihadiri oleh PKC, PC, PCI, dan peninjau.
3. Kongres diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
4. Kongres sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya ½+1 dari jumlah peserta Kongres.
5. Kongres memiliki kewenangan:
   a. Menetapkan atau merubah AD/ART PMII.
   b. Menetapkan atau merubah Aswaja dan NDP PMII.

c. Menetapkan atau merubah paradigma organisasi dan pengembangan kaderisasi PMII.
d. Menetapkan atau merubah pokok - pokok pikiran dan rekomendasi.
e. Menetapkan dan menilai LPJ PB PMII.
f. Menetapkan Ketua Umum PB PMII, Ketua KOPRI PB PMII, dan tim formatur.

Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)

1. Muspimnas adalah forum tertinggi setelah Kongres.
2. Muspimnas dihadiri oleh PB, PKC, PC, dan PCI.
3. Muspimnas diadakan paling sedikit satu kali dalam satu periode kepengurusan PB.
4. Muspimnas memiliki kewenangan:

a. Menghasilkan ketetapan organisasi dan Peraturan Organisasi.
b. Membahas dinamika organisasi dan situasi nasional baik yang bersifat internal maupun eksternal.
c. Menerima laporan perkembanganb kaderisasi dan perkembangan keorganisasian dari PKC, PC, dan PCI.

Rakernas

1. Rakernas dilaksanakan oleh PB PMII.
2. Rakernas dilaksanakan minimal satu kali selama satu periode.
3. Peserta Rakernas adalah Pengurus Harian PB PMII, biro - biro, badan semi otonom dan lembaga - lembaga semi otonom.

4. Rakernas memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan rencana kerja berdasarkan hasil Kongres.

Rapat Pleno Lengkap

1. Rapat Pleno Lengkap adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PB PMII, Ketua PKC, dan Ketua KOPRI PKC, yang berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas PKC dan melaporkan perkembangan cabang di bawah koordinasi masing - masing PKC.
2. Rapat pleno lengkap dilaksanakan minimal 2 kali dalam satu periode.

Rapat Pleno BPH PB

1. Rapat Pleno BPH PB adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PB yang berfungsi untuk membahas hal - hal strategis dan menetapkan keputusan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PB dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentatif) sesuai kebutuhan organisasi.

Konkoorcab

1. Konkoorcab adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat PKC
2. Dihadiri oleh utusan PC.
3. Dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah PC yang sah.
4. Diadakan setiap 2 tahun sekali.
5. Konkoorcab dilaksanakan secara serentak oleh seluruh PKC
6. Waktu pelaksanaan Konkoorcab serentak ditetapkan oleh Pleno BPH PB
7. Konkoorcab memiliki wewenang:

a. Menyusun program kerja PKC dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII.
b. Menilai laporan pertanggung jawaban PKC.
c. Memilih dan menetapkan Ketua PKC, Ketua KOPRI PKC dan tim formatur.

Muspimda

1. Muspimda adalah forum tertinggi setelah Konkoorcab
2. Muspimda dihadiri PKC dan PC yang berada dalam wilayah koordinasinya
3. Muspimda dilaksanakan minimal satu sekali dalam satu periode
4. Muspimda memiliki kewenangan:
   a. Menyusun dan menetapkan peraturan organisasi yang mengikat kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan organisasi yang lebih tinggi
   b. Membahas dinamika organisasi dan situasi lokal baik yang bersifat internal maupun eksternal
   c. Menerima laporan perkembangan kaderisasi dan perkembangan keorganisasian dari PC

Rakerda

1. Rakerda dilaksanakan oleh PKC minimal satu kali dalam masa kepengurusan.
2. Peserta Rakerda adalah BPH PKC, biro - biro, badan semi otonom, dan lembaga - lembaga semi otonom.
3. Rakerda berwenang merumuskan rencana kerja berdasarkan hasil Konkoorcab.

Rapat Pleno BPH PKC

1. Rapat Pleno BPH PKC adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PKC yang berfungsi untuk membahas hal - hal strategis dan menetapkan keputusan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PKC dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentatif) sesuai kebutuhan organisasi.

Konfercab

1. Konfercab adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat PC
2. Konfercab dihadiri oleh utusan PK dan PR
3. Konfercab diadakan satu tahun sekali.
4. Apabila PC dibentuk berdasarkan ART pasal 20 ayat 3 maka Konfercab dihadiri oleh ½+1 dari jumlah kader yang ada.
5. Konfercab dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta atau suara yang sah.
6. Konfercab dilaksanakan secara serentak oleh seluruh PC
7. Waktu pelaksanaan Konfercab serentak ditetapkan oleh Pleno BPH PB
8. Konfercab memiliki wewenang:
    a. Menyusun program kerja PC dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII.
    b. Menilai laporan pertanggung jawaban PC.
    c. Memilih dan menetapkan Ketua PC, Ketua KOPRI PC, dan tim formatur.

Konfercab Internasional

1. Konfercab Internasional adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat PCI.

2. Konfercab Internasional dihadiri oleh anggota PCI di negara setempat.
3. Konfercab Internasional diadakan satu tahun sekali.
4. Konfercab Internasional dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlahanggota.
5. Konfercab Internasional memiliki wewenang:
    a. Menyusun program kerja PCI dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII.
    b. Menilai laporan pertanggung jawaban PCI.
    c. Memilih dan menetapkan Ketua PCI, Ketua KOPRI PCI, dan tim formatur.

Muspimcab

1. Muspimcab adalah forum tertinggi setelah Konfercab.
2. Muspimcab dihadiri oleh PC, PK dan PR.
3. Muspimcab diadakan paling minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan
4. Muspimcab memili kewenangan:
    a. Menyusun dan menetapkan peraturan organisasi yang menyangkut kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
    b. Membahas dinamika organisasi dan situasi lokal baik yang bersifat internal maupun eksternal.
    c. Menerima laporan perkembangan kaderisasi dan perkembangan keorganisasian dari PK dan PR.

Rakercab

1. Rakercab dilaksanakan oleh PC minimal satu kali dalam masa kepengurusan.

2. Peserta Rakercab adalah BPH PC, biro - biro, badan semi otonom, dan lembaga - lembaga semi otonom.
3. Rakercab berwenang merumuskan rencana kerja berdasarkan hasil Konfercab.

Rapat Pleno BPH PC

1. Rapat Pleno BPH PC adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PC yang berfungsi untuk membahas hal - hal strategis dan menetapkan keputusan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PC dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentatif) sesuai kebutuhan organisasi.

RTK

1. RTK adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat komisariat.
2. RTK dihadiri oleh utusan PR.
3. RTK diadakan satu tahun sekali.
4. Apabila Komisariat dibentuk berdasarkan ART pasal 22 ayat 3 maka RTK dihadiri oleh ½+1 dari jumlah anggota yang ada.
5. RTK dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta atau suara yang sah.
6. RTK memiliki wewenang:
   a. Menyusun program kerja PK dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII.
   b. Menilai laporan pertanggung jawaban PK.
   c. Memilih dan menetapkan Ketua PK, Ketua KOPRI PK, dan tim formatur.

Rapat Pleno BPH PK

1. Rapat Pleno BPH PK adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PK yang berfungsi untuk membahas hal - hal strategis dan menetapkan keputusan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PK dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentatif) sesuai kebutuhan organisasi.

RTAR

1. RTAR adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat rayon.
2. RTAR dihadiri oleh PR dan anggota di lingkungannya.
3. RTAR diadakan satu tahun sekali.
4. RTAR dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta atau suara yang sah.
5. RTAR memiliki wewenang:
   a) Menyusun program kerja PR dalam rangka pelaksanaan program dankebijakan PMII.
   b) Menilai laporan pertanggung jawaban PR.
   c) Memilih dan menetapkan Ketua PR, Ketua KOPRI PR, dan tim formatur.
6. Setiap satu anggota memiliki satu suara.

Rapat Pleno BPH PR PMII

1. Rapat Pleno BPH PR adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PR yang berfungsi untuk membahas hal - hal strategis dan menetapkan keputusan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PR dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentatif) sesuai kebutuhan organisasi.

KLB

1. KLB merupakan forum yang setingkat dengan Kongres.
2. KLB dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap AD/ART dan atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh PB.
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi ditetapkan oleh Mahkamah Tingkat Tinggi PMII.
4. Ketentuan mengenai Mahkamah Tingkat Tinggi diatur dalam Peraturan Organisasi.
5. KLB diadakan atas usulan minimal 2/3 dari jumlah PKC, PC, dan PCI definitif.
6. Sebelum diadakan KLB, setelah syarat - syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) terpenuhi, kepengurusan PB diambil alih oleh Mabinas dan membentuk panitia KLB yang terdiri dari unsur Mabinas, PKC, PC, dan PCI.

Konkoorcab-LB

1. Konkoorcab-LB merupakan forum yang setingkat dengan Konkoorcab.
2. Konkoorcab-LB dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap AD/ART dan atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh PKC.
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi ditetapkan oleh Pleno BPH PB.
4. Konkoorcab-LB diadakan minimal atas usulan 2/3 dari jumlah PC definitif.
5. Usulan Konkoorcab-LB diajukan kepada PB.
6. Sebelum diadakan Konkoorcab-LB, setelah syarat - syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) terpenuhi, kepengurusan PKC diambil alih oleh PB dengan membentuk tim caretaker.

Konfercab-LB

1. Konfercab-LB merupakan forum yang setingkat dengan Konfercab.
2. Konfercab-LB dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap AD/ART dan atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh PC.
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi ditetapkan oleh Pleno BPH PB.
4. Konfercab-LB diadakan minimal atas usulan 2/3 dari jumlah PK dan PR definitif.
5. Apabila PC dibentuk berdasarkan ART pasal 20 ayat 3 maka Konfercab-LB diadakan atas usulan dari ½+1 dari jumlah kader yang ada.
6. Usulan Konfercab-LB diajukan kepada PB.
7. Sebelum diadakan Konfercab-LB, setelah syarat - syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) terpenuhi, kepengurusan PC diambil alih oleh PB dengan membentuk tim caretaker.

Konfercab Internasional-LB

1. Konfercab Internasional-LB merupakan forum yang setingkat dengan Konfercab Internasional.
2. Konfercab Internasional-LB dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap AD/ART dan atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh PCI.
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi ditetapkan oleh Pleno BPH PB.
4. Konfercab Internasional-LB diadakan minimal atas usulan 2/3 dari jumlah anggota.
5. Usulan Konfercab Internasional-LB diajukan kepada PB.

6. Sebelum diadakan Konfercab Internasional-LB, setelah syarat - syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) terpenuhi, kepengurusan PCI diambil alih oleh PB dengan membentuk tim caretaker.

RTK-LB

1. RTK-LB merupakan forum yang setingkat dengan RTK.
2. RTK dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap AD/ART dan atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh PK.
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi ditetapkan oleh Pleno BPH PC.
4. RTK-LB diadakan minimal atas usulan 2/3 dari jumlah rayon definitif yang ada.
5. Apabila PK dibentuk berdasarkan ART pasal 22 ayat 3 maka RTK-LB diadakan atas usulan dari ½+1 dari jumlah anggota yang ada.
6. Usulan RTK-LB diajukan kepada PC.
7. Sebelum diadakan RTK-LB, setelah syarat - syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) terpenuhi, kepengurusan PK diambil alih oleh PC dengan membentuk tim caretaker.

RTAR-LB

1. RTAR-LB merupakan forum yang setingkat dengan RTAR.
2. RTAR dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap AD/ART dan atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh PR.
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi ditetapkan oleh Pleno BPH PC
4. RTAR-LB diadakan minimal atas usulan 2/3 dari jumlah anggota yang ada.
5. Usulan RTAR-LB diajukan kepada PC.

6. Sebelum diadakan RTAR-LB, setelah syarat - syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) terpenuhi, kepengurusan PR diambil alih oleh PC dengan membentuk tim caretaker.

Quorum dan Pengambilan Keputusan

1. Permusyawaratan seperti tersebut dalam ART ini adalah sah apabila dihadiri ½+1 dari seluruh jumlah peserta.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila hal ini tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilaksanakan secara bebas dan rahasia.
4. Dalam hal pemilihan terdapat suara yang seimbang, maka pemilihan diulang kembali.
5. Apabila dalam pemilihan kedua masih terdapat suara yang sama, maka akan ditentukan dengan mekanisme undi (qur'ah) yang dipimpin oleh pimpinan sidang dengan asas musyawarah dan kekeluargaan.

G. ANTROPOLOGI KAMPUS

1. Pengertian Antropologi

Kata dasar dari antropologi berasal dari Yunani yaitu Anthros yang berarti manusia sedangkan logos berarti ilmu. Sederhananya, bahwa antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia. Para ahli antropolog mendefinisikan antropologi sebagai berikut;

- William A. Haviland (seorang antropolog Amerika); antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.
- David E. Hunter (Antropolog Amerika); antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia.
- Koentjaraningrat (bapak antropolog Indonesia); antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.

Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa antropologi merupakan ilmu/bidang studi yang mempelajari tentang segala sesuatu/ apa-apa yang berkaitan dengan manusia baik berupa fisik maupun budaya sehingga dapat disimpulkan kecenderungan manusia sebagai makhluk sosial.

2. Pengertian Kampus

Istilah kampus sudah sangat familiar sekali tentunya di kalangan civitas akademika. Kampus merupakan deretan gedung yang ada di perguruan tinggi sebagai sarana tempat kuliah dan tempat berlangsungnya belajar mengajar bagi mahasiswa. Tetapi pengertian gedung di atas apabila disandingkan dengan kampus untuk era modern ini sepertinya tidak lagi relevan lagi seiring dengan perkembangan ilmu komunikasi.

Alasan ini berdasarkan dari pemahaman masing-masing

individu tentang kampus itu sendiri, ada sebagian kelompok yang menyatakan bahwa kampus adalah tempat untuk belajar, berdiskusi dan berkontemplasi. Ada pula kelompok lain yang menyatakan bahwa kampus adalah jenjang dimana mahasiswa mulai membuka alam pikirannya menuju strata yang lebih tinggi dan luas untuk menjadi manusia sejati yang dapat membuka jendela dunia.

3. Pengertian Antropologi Kampus

Antropologi sebenarnya kata yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Sebab, apabila antropologi sendiri disematkan dengan kata antropologi budaya, antropologi politik, antropologi agama dan lain sebagainya sudah menjadi keilmuan yang terstruktur dan sudah menjadi satu Cabang keilmuan. Namun, agak begitu asing ketika antropologi disandingkan dengan kata kampus. Karena memang belum ada yang konsen terhadap suatu Cabang keilmuan yang terstruktur dan pembahasan yang tuntas mengenai antropologi kampus.

Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia sebagai organisasi gerakan mahasiswa menganggap bahwa kader-kadernya seharusnya dapat memahami bahkan mampu membaca kampus mereka secara utuh. Hal ini menjadi penting, karena sebagai pijakan mereka untuk berproses di bangku perkuliahan.

Dalam pengertian di atas sudah dipaparkan bahwa antropologi adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang manusia. Dalam studi kajian antropologi (manusia) mencakup tentang sejarah, perilaku, bentuk fisik masyarakat, tradisi-tradisi, nilai-nilai dan interaksi antar manusia sampai budaya baru yang dapat dihasilkan karena interaksi tersebut. Sedangkan pengertian kampus sendiri diatas sebelumnya

sudah dipaparkan bahwa tempat sebagai sarana maupun prasarana wahan untuk belajar mahasiswa.

Jadi secara garis besar antropologi kampus dapat diistilahkan sebagai kajian ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan, perilaku, tradisi, nilai-nilai, interaksi dan lain sebagainya yang dianggap penting dalam dinamika dalam dunia kampus maupun lingkungan sekitar yang berhubungan dengan kampus. Istilah ini sangat esensial, karena antropologi kampus untuk dunia pergerakan sejarah telah mencatat bahwa perjalanan panjang bangsa Indonesia tidak lepas dari peran serta mahasiswa.

4. Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta IAIN With Wider Mandate

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu IAIN tertua di Indonesia yang bertempat di ibukota Jakarta, menempati posisi yang unik dan strategis. Ia tidak hanya menjadi "jendela Islam di Indonesia", tetapi juga sebagai simbol pembangunan nasional, khususnya di bidang pembangunan sosial–agama. Sebagai upaya untuk mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama, lembaga ini mulai mengembangkan diri lengkap dengan konsep IAIN dengan mandate yang lebih luas (IAIN with wider mandate) menuju terbentuknya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Langkah ini mulai diintensifkan pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Azyumardi Azra,MA dengan dibukanya jurusan psikologi dan pendidikan matematika pada Fakultas Tarbiyah, serta jurusan ekonomi dan perbankan pada Fakultas Syariah pada tahun akademik 1998/1999. Untuk lebih memantapkan langkah konversi ini, pada tahun 2000 dibuka program studi Agribisnis dan Teknik Informatikayang bekerjasama dengan Institute Pertanian Bogor (IPB) serta

badan pengkajian dan penerapan Teknologi (BPPT) dan program studi Manajemen dan Akuntansi. Pada tahun 2001 diresmikan Fakultas Psikologi dan Dirosat Islamiyah bekerjasama dengan Al-azhar, Mesir. Selain itu dilakukan pula upaya kerjasama dengan Islamic Development Bank (IDB) sebagai penyandang dana kampus yang modern; McGill University melalui Canadian International Development Agency (CIDA); Leiden university (INIS); Universitas Al-azhar (Kairo); King Saud (Riyadh); Universitas Indonesia, Institute Pertanian Bogor (IPB); Ohio University; Lembaga Indonesia Amerika (LIA); Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Bank BNI; Bank Muamalat Indonesia (BMI); dan universitas-universitas serta lembaga-lembaga lainnya.

5. Periode UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Mulai 20 Mei 2002)

Dengan keluarnya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 031 tanggal 20 mei 2002 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta resmi berubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Peresmiannya dilakukan oleh wakil presiden republik Indonesia, Hamza Haz, pada 8 juni 2002 bersamaan dengan upacara Dies Nataliske -45 dan Lustrum ke 9 serta pemancangan tiang pertama pembangunan kampus UIN Syarif hidayatullah Jakarta melalui dana Islamic development bank (IDB).

Satu langkah lagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menambah fakultas yaitu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (program studi Kesehatan Masyarakat) sesuai surat keputusan menteri pendidikan nasional nomor 1338/D/T/2004 tahun 20014 tanggal 12 april tentang izin penyelenggaraan program studi kesehatan masyarakat (S1) pada Universitas Islam Negeri dan keputusan Direktur

Jenderal Kelembagaan Islam tentang izin penyelenggaraan program studi Kesehatan masyarakat program sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta nomor Dj.II/37/2004, tanggal 19 Maret 2004. Sebagai bentuk reintegrasi ilmu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun akademik 2002/2003 menetapkan nama-nama fakultas sebagai berikut;

1. Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan
2. Fakultas Adab Dan Humaniora
3. Fakultas Ushuludin
4. Fakultas Syariah Dan Hukum
5. Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
6. Fakultas Dirasat Islamiyah
7. Fakultas Psikologi
8. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
9. Fakultas Sains Dan Teknologi
10. Fakultas Kedokteran
11. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

6. Sekolah Pascasarjana

Hingga tahun 2023 kini, wisuda ke-128 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menghasilkan alumni kurang lebih dari 80.00 orang, baik lulusan sarjana (S1) Maupun sarjana magister (S2) dan sarjana doktor (S3). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berupaya menyiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu terkait lainnya dalam arti yang luas.“MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN HAK-HAK MAHASISWA DI KAMPUS YANGTIDAK BERTENTANGAN DENGAN KODE ETIK MAHASISWA”

Adapun tujuan dengan perjuangan bersama seluruh

elemen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai salah satu komponen civitas akademika yang bergerak non-struktural dan dapat membantu visi & misi Kampus. Maka dengan ini harapan besar mahasiswa dapat mendapatkan hak dan kewajiban yang terbuka.

7. Pola Pelaksanaan Organisasi mahasiswa

Dalam pelaksanaan organisasi sebagai wujud tercapainya tujuan Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah memiliki orientasinya. Sinergi komponen non-struktural ini haruslah menjadi visi & misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun pelaksanaan ini terbagi untuk mewujudkan tujuan Organisasi Kemahasiswaan dari sisi internal dan eksternal. Dimana pola pelaksanaan ini sebagai realisasi gerakan mahasiswa.

Dari Sisi Internal:

- Membentuk kesadaran kebangsaan, kepancasilaan dan keIslaman dalam tindakan keseharian
- Mengoptimalkan wakil mahasiswa sebagai sarana keterwakilan mahasiswa yang harus diperjuangkan hak-haknya
- Mewujudkan Sarana advokasi mahasiswa yang dapat diketahui oleh seluruh mahasiswa
- Menganalisa dan mempromosikan kemampuan akademik, bakat, minat dan kreativitas mahasiswa
- Mewadahi penelitian yang dilakukan mahasiswa guna pengembanganakademik
- Membuat informasi dan komunikasi yang terpusat dan bersinergi dengan civitas akademika

- Memprakarsai kegiatan yang keberlanjutan untuk keaktifan mahasiswa
- Membentuk wadah aspirasi mahasiswa untuk menyikapi keadaan objektif kampus
- Memprakarsai kegiatan yang keberlanjutan tentang kesehatan dan kepedulian lingkungan kampus

Dari Sisi Eksternal

- Menumbuh-kembangkan kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan sosial disekitar kampus
- Turut aktif menyikapi setiap kebijakan pemerintah
- Menjalin kerjasama dengan pihak luar kampus sebagai ajang kemandirian mahasiswa
- Menjalin komunikasi dengan baik terhadap institusi diluar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Membentuk wadah aspirasi mahasiswa untuk menyikapi keadaan objektif masyarakat

8. PMII dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat sebagai salah satu organ ekstra kampus, memiliki kaitan yang cukup erat dengan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini Dikarenakan sejarah panjang

antara UIN Jakarta dengan PMII sudah tercatat sejak PMII Cabang Ciputat pertama kali berdiri pada tanggal 9 september 1960. Pada saat itu, kader PMII Ciputat yang berjumlah 57 orang memulai pergerakan mereka menyebarluaskan ajaran ahlusunnah waljamaah di UIN Jakarta saat itu, dan memulai roda organisasi sebagai embrio awal gerakan mahasiswa Islam yang berlatar belakang NU. Salah satu tokoh PMII Ciputat yang tersohor hingga kancah nasional saat itu adalah **sahabat Zamroni** yang menjadi ketua presidium KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). sahabat Prof. Dr. Chatibul Umam, yang merupakan guru besar di UIN Jakarta saat ini.

Hingga saat ini, hubungan antara PMII dan UIN sangat tidak dapat dipisahkan,mengingat bahwa kaderisasi yang dijalankan PMII memiliki lingkup kampus UIN Jakarta itu sendiri. Selain itu, PMII Ciputat dan UIN Jakarta sendiri masih memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, karena notabene alumni PMII Ciputat sebagian besarnya adalah dosen dan tenaga pengajar kampus UIN Jakarta, hingga ada yang menduduki posisi-posisi strategis.

9. Sejarah Universitas Pamulang

Selain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta PMII Cabang Ciputat dihuni juga oleh Universitas Pamulang yang disingkat dengan UNPAM, yaitu salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Banten. Universitas Pamulang merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh Yayasan Sasmita Jaya.

UNPAM berdiri pada 15 Mei 2000 yang berlokasi di Pamulang, Kota Tangerang Selatan, tidak jauh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UNPAM didirikanoleh Yayasan Prima Jaya yang diketuai oleh Drs. Wayan. Namun karena ketidakmampuan Yayasan Prima Jaya dalam mengelola

suatu Universitas, maka mereka pun mengalihkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada Yayasan Sasmita Jaya pada awal tahun 2005.

Untuk saat ini Universitas Pamulang sudah memiliki 7 Fakultas dan 23 Program Studi, antara lain:

- Fakultas Agama Islam
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas Hukum
- Fakultas Teknik
- Fakultas Sastra
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Fakultas Ilmu Komputer
- Fakultas MIPA
- Fakultas FISIP
- Fakultas Pascasarjana

10. PMII dan Universitas Pamulang

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat sebagai salahsatu organ ekstra kampus, yang hadir sebagai organisasi ekstra mahasiswa di Universitas Pamulang sejak tahun 2017. Pada saat itu, kader PMII Ciputat di UNPAM berjumlah 7 orang memulai pergerakan untuk menyebarkan ajaran ahlussunnah wal jama'ah dengan menjalankan organisasi pergerakan mahasiswa Islam berlatar belakang Nahdlatul Ulama.

Hingga saat ini, roda organisasi PMII di UNPAM masih terus berjalan. Hinggatahun 2023 tercatat sebanyak kurang lebih 1000 kader PMII Ciputat yang berstatus sebagai mahasiswa aktif UNPAM, yang dinaungi oleh PMII Komisariat Universitas Pamulang (PMII KOMNIVPAM). Hubungan antara PMII dan UNPAM tidak dapat dipisahkan, karena kaderisasi yang dijalankan PMII dilakukan dalam lingkup

kampus UNPAM. Selain itu, kader-kader PMII menduduki posisi strategis di organisasi intra kampus.

PMII KOMNIVPAM, menaungi dua kampus yang dimiliki oleh yayasan Sasmita Jaya, selain Universitas Pamulang PMII KOMNIVPAM juga memiliki kader yang berasal dari STIKES Widya Dharma Husada yang memiliki empat program studi ; Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, Kebidanan dan Farmasi.

H. MAHASISWA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

1. Pengertian Mahasiswa

Secara bahasa pengertian mahasiswa dijelaskan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mahasiswa menurut, mahasiswa ialah pelajar perguruan tinggi. Selain itu terdapat pendapat dari beberapa ahli yang menjelaskan pengertian mahasiswa sebagaimana yang dijelaskan oleh Knopfemacher [dalam Suwono, 1978] yeng menjelaskan bahwa mahasiswa merupakan insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi, dididik & di harapkan menjadi calon–calon intelektual, selain itu terdapat pendapat yang disampaikan oleh Sarwono [1978] dimana beliau menyampaikan bahwa mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran diperguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun. Didalam struktur pendidikan Indonesia, mahasiswa menduduki jenjang satuan pendidikan tertinggi di antara yang lain.

Dari kedua pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwa mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat. Jika dirangkum dari segi kebahasaan maupun pendapat dari para ahli

mengenai pengertian mahasiswa dapat dirangkum menjadi, suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi, universitas, institut ataupun akademi.

2. Peran dan Fungsi Mahasiswa

Sebagai mahasiswa berbagai macam label pun disandang, ada beberapa macam label yang melekat pada diri mahasiswa, adalah:

Iron Stock (penerus bangsa) – sebagai penerus bangsa, mahasiswa dituntut untuk bisa menjadi pengganti orang-orang yang memipin di pemerintahan nantinya, yang berarti mahasiswa akan menjadi generasi penerus untuk memimpin bangsa ini nantinya.

Agent Of Change (agen perubahan) – sebagai agen perubahan mahasiswa yang telah dianggap dewasa dan memiliki tanggung jawab atas ilmu yang telah mereka dapatkan dituntut untuk menjadi agen perubahan dikarenakan ilmu yang didapat semasa kuliah dapat membawa perubahan atas kesalahan yang terjadi di lingkungan sekitar.

Social Control (kontrol sosial) – sebagai kontrol sosial, kemampuan mahasiswa untuk membawa keadilan kepada masyarakat atas birokrasi yang salah juga menjadi salah satu tuntutan yang diemban dikarenakan, posisi mahasiswa yang dianggap memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dapat membantu masyarakat atas ketidak adilan yang terjadi.

Moral Force (petugas moral) – sebagai betugas moral, mahasiswa juga dituntut untuk dapat menjaga dan menjadi petugas moral. Sebagaimana yang telah di ketahui bahwa dalam ranah pendidikan posisi mahasiswa merupakan posisi tertinggi atau terakhir dari jenjang Pendidikan sehingga sebagai kaum “terdidik” tanggung jawab moral juga menjadi tanggungan yang harus dipertanggung jawabkan sebagai mahasiswa.

Akan tetapi secara garis besar, ada 3 peran dan fungsi yang sangat penting bagi mahasiswa, yaitu:

Pertama, peranan moral. Dunia kampus merupakan dunia di mana setiap mahasiswa memiliki kebebas atas kehidupan yang mereka jalani. Namun kebebasan tersebut juga memiliki konsekuensi yakni tanggung jawab moral terhadap diri masing-masing sebagai indivdu untuk dapat menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan moral dan norma dalam hidup bermasyarakat.

Kedua, adalah peranan sosial. Selain tanggung jawab individu, mahasiswa juga memiliki peranan sosial, yaitu bahwa keberadaan dan segala perbuatannya tidak hanya hanya berdampak pada diri sendiri namun juga bagi lingkungan sekitarnya. Kesadaran akan hal tersebut yang akhirnya mengharuskan mahasiswa untuk menjalani tanggung jawab atas kondisi sosial yang terjadi di masyarakat.

Ketiga, adalah peranan intelektual. Sebagai individu yang dipandang terpelajar, mahasiswa juga mengemban tanggung jawab untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan status yang telah disandakannya di masyarakat. Dalam arti menyadari betul bahwa fungsi dasar mahasiswa adalah bergelut dengan ilmu pengetahuan dan membawa perubahan yang lebih baik dengan intelektualitas yang ia miliki selama menjalani pendidikan.

3. Peran Strategis Mahasiswa

Dalam proses perubahan sosial dan kebudayaan mahasiswa memiliki posisi dan peranan yang essensial. Ia sebagai transformator nilai-nilai dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya serta, merintis perubahan dalam rangka dinamisasi kehidupan dalam peradaban yang sedang berjalan.

Kalau kita percaya bahwa masa kini adalah proses masa lalu yang mendapat pengaruh dari cita-cita masa depan, maka kedudukan dan peranan mahasiswa sebagai transformator nilai dan inovator dari perkembangan yang berorientasi ke masa depan. Cita-cita yang dibawa dalam nilai-nilai ideal, membangun subkultur serta berani memperjuangkan idealism yang di tanamkan harus menjadi sebuah semangat hidup yang dilanai dalam kehidupan menjadi mahasiswa.

Sebagai bagian dari intelektual community mahasiswa menduduki posisi yang strategis dalam keterlibatannya melakukan rekayasa sosial menuju independensi masyarakat pada aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dalam posisinya sebagai komunitas terdidik, mahasiswa sebagai salah satu kunci penentu dalam transformasi menuju keadilan dan kemakmuran bangsa, disamping dua kelompok strategis lainnya yaitu kaum agamawan dan masyarakat sipil (Madani) yang mempunyai kesadaran kritis atas situasi sosial yang sedang berlangsung saat ini. Posisi mahasiswa secara sederhana bisa kita gambarkan sebagai sosok yang barada di tengah-tengah. Di masyarakat menjadi bagian masyarakat, dikalangan intelektual mahasiswa juga dianggap berada diantara mereka. Dengan kata lain keberadaan mereka berada di tengah-tengah level apapun mempunyai nilai strategis. Nilai strategis lain mahasiswa menurut Arbi Sanit adalah mahasiswa sebagai komunitas strategis dalam proses perubahan.

4. Mahasiswa dalam Peranan Perubahan

Berawal dari gerakan organisasi mahasiswa Indonesia di tahun 1908, Boedi Oetomo. Gerakan yang telah menetapkan tujuannya yaitu “kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa” ini telah lahir dan mampu memberikan warna perubahan yang luar biasa positif terhadap perkembangan gerakan kemahasiswaan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Gerakan kemahasiswaan lainnya pun terbentuk, Mohammad

Hatta mempelopori terbentuknya organisasi kemahasiwaan yang beranggotakan mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar di Belanda yaitu Indische Vereeninging (yang selanjutnya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia). Kelahiran organisasi tersebut membuka lembaran sejarah baru kaum terpelajar dan mahasiswa di garda depan sebuah bangsa dengan misi utamanya “menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan hak-hak kemanusiaan dikalangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan”.

Gerakan mahasiswa tidak berhenti sampai disitu, gerakannya berkembang semakin subur, angkatan 1928 yang dimotori oleh beberapa tokoh mahasiswa diantaranya Soetomo (Indonesische Studie-club),Soekarno (Algemeene Studie-club), hingga terbentuknya juga Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang merupakan cikal bakal organisasi telah menghimpun seluruh gerakan mahasiswa ditahun 1928, gerakan mahasiswa angkatan 1928 memunculkan sebuah ideologi dan semangat persatuan dan kesatuan diseluruh pelosok Indonesia untuk meneriakkan dengan lantang dan menyimpannya didalam jiwa seluruh komponen bangsa, kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu yaitu tumpah darah Indonesia, berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa satu yaitu bahasa Indonesia dan hingga kini kita kenal sebagai sumpah pemuda. Gerakan perjuangan mahasiswa sebagai kontrol pemerintahan dan kontrol sosial terus tumbuh dan berkembang, hinggalah gerakan perjuangan mahasiswa sampai pada terjadinya peristiwa 10 tahun yang lalu yaitu tragedi Trisakti Mei 1998.

Lagi-lagi mahasiswa menjadi garda terdepan didalam perubahan terhadap negeri ini, gerakan perjuangan ini menuntut reformasi perubahan untuk mengganti rezim orde baru yang korup, kolusi, dan nepotisme serta tidak berpihak kepada rakyat dan memaksa turun presiden soeharto dari kursi kekuasaannya yang telah digenggamnya selama hampir

32 tahun. Gerakan perjuangan mahasiswa tidak semudah yang kita bayangkan, perubahan ini harus dibayar mahal dengan meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti oleh timah petugas aparat yang tidak mengharapkan perubahan itu terjadi.

Sejarah panjang gerakan mahasiswa merupakan salah satu bukti, kontribusinya, eksistensinya, dan peran serta tanggung jawabnya mahasiswa dalam memberikan perubahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Peran mahasiswa terhadap bangsa dan negeri ini bukan hanya duduk di depan meja dan mendengarkan dosen berbicara, akan tetapi mahasiswa juga mempunyai berbagai peran dalam melaksanakan perubahan untuk bangsa Indonesia, peran tersebut adalah sebagai generasi penerus yang melanjutkan dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan pada suatu kaum, sebagai generasi pengganti yang menggantikan kaum yang sudah rusak moral dan perilakunya, dan juga sebagai generasi pembaharu yang memperbaiki dan memperbaharui kerusakan dan penyimpangan negatif yang ada pada suatu kaum. Peran ini senantiasa harus terus terjaga dan terpartri didalam dada mahasiswa Indonesia baik yang ada didalam negeri maupun mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri. Apabila peran ini bisa dijadikan sebagai sebuah pegangan bagi seluruh mahasiswa Indonesia, “ruh perubahan” itu tetap akan bisa terus bersemayam dalam diri seluruh mahasiswa Indonesia.

Gerakan perjuangan mahasiswa Indonesia tidak boleh berhenti sampai kapanpun ,gerakan perjuangan mahasiswa saat ini tidak hanya dengan bergerak bersama-sama untuk berdemonstrasi dan berorasi dijalan-jalan saja, akan tetapi wahai para Agent of Change, cobalah untuk bertindak bijak dengan intelektualisme, idealisme, dan keberanianmu untuk bisa senantiasa menanamkan ruh perubahan yang ada dalam dirimu untuk bisa memberi kebaikan dan berperan besar serta bertanggung jawab untuk memberikan kemajuan bangsa dan

Negara Indonesia, sehingga seperti Hasan al Banna katakan “goreskanlah catatan membanggakan bagi umat manusia”.

5. Cermin Sejarah Gerakan Mahasiswa

Perguruan tinggi masih dipandang sebagai institusi independen sehingga banyak harapan akan adanya pemikiran- pemikiran baru tentang ke-Indonesiaan yang dihasilkan oleh institusi ini. Sebagai bagian dari civitas akademika, mahasiswa diharapkan mampu memberikan gagasan dan ide-ide ke- Indonesiaan. Namun ternyata dinamika perpolitikan negara sangat mudah mengerakkan mahasiswa sebagai kekuatan gerakan ekstra parlementer. Melalui peran ini, mahasiswa hendak mengartikulasikan aspirasi politiknya untuk mempengaruhi proses- proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Kesemuanya itu diniati sebagai artikulasi kepentingan rakyat, berbareng bergerak bersama rakyat, sehingga diharapkan akan menjadi satu gerakan people power yang masif dan progresif.

Dalam fakta, cita-cita luhur mahasiswa Indonesia nyaris menjadi utopi. Gerakan mahasiswa Indonesia sering hanya dijadikan alat dari kelompok-kelompok kepentingan yang mengatasnamakan rakyat. Tiga fakta menunjukkan kesimpulan itu. Pertama, gerakan mahasiswa tahun 1945-1966, mahasiswa bangkit melihat kondisi negara yang sedang mengalami kegoncangan. Sistem politik nasional selalu mengalami perubahan bentuk pemerintahan, mulai dari Republik Indonesia Serikat (RIS), Demokrasi Terpimpin dan kembali lagi ke Republik. Lantas mulai dominannya partai komunis di pentas politik nasional juga membawa kekhawatiran bagi banyak kalangan di Indonesia. Tampaknya hanya sedikit yang sadar, bahwa tahun-tahun tersebut (1960-an) Indonesia menjadi panggung penting Perang Dingin.

Pada akhirnya mahasiswa memang ‘mampu’ mengulingkan kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Namun kekuatan mahasiswa tidak muncul dengan sendirinya.

ABRI mulai berinfiltrasi dalam tubuh gerakan mahasiswa melalui Badan Kerja Sama Pemuda Militer yang terbentuk tahun 1957. Sebagai respon atas pertentangan ideologi ketika itu, ABRI melirik mahasiswa sebagai kelompok independent untuk menjadi mitra dengan menggulingkan Soekarno, mahasiswa telah membantu menaikkan Jenderal Soeharto untuk menduduki kursi presiden. Namun kemudian mahasiswa justru harus berhadapan dengan strategi depolitisasi oleh pemerintah, yang lebih tertarik untuk berkoalisi dengan intelektual dan teknokrat murni yang selama ini tidak pernah concern dengan persoalan politik.

Kedua, gerakan mahasiswa tahun 1974/1975. Mahasiswa sempat terprovokasi oleh isu-isu anti Jepang sehingga pada tanggal 15 Januari 1975 (Malari),terjadi pembakaran produk-produk Jepang di Indonesia. Padahal gejolak politik ekonomi waktu itu merupakan akibat dari pertarungan perebutan pasar antara AS dan Jepang. Akibat Malari pemerintah mengeluarkan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang membatasi aktivitas mahasiswa dalam kegiatan minat-bakat.

Ketiga, gerakan mahasiswa tahun 1998. Faktor signifikan yang mendorong Soeharto mundur adalah fluktuasi kurs rupiah atas dollar AS dan berhentinya pasar modal dalam negeri. Faktor tersebut muncul sebagai respon atas kekuasaan Soeharto yang hanya berorientasi membangun istana ekonomi keluarga dan kroni, sehingga menutup peluang investasi pengusaha-pengusaha asing khususnya AS dan dinilai mengancam kepentingan internasional AS. Situasi seperti ini, ditambah kondisi yang 32 tahun dirasakan rakyat, memunculkan isu-isu populis yang kemudian terkenal dengan 6 visi reformasi (Adili Soeharto, cabut dwi fungsi ABRI, Hapus KKN, tegakkan supremasi hukum, otonomi daerah dan Amandemen UUD`1945). Momentum gerakan mahasiswa kemudian dimanfaatkan oleh elit tertentu. “Gerakan reformasi ini telah dimanipulasi para elit politik, baik elit politik yang lama

maupun yang mabaru, yang masih berambisi meraih kekuasaan bagi diri dan kelompoknya dengan cara kompromi diantaranya lewat pemilu yang dilaksanakan tahun 1999" (Meluruskan Arah Perjuangan Reformasi dan Merajut Kembali Merah-Putih yang Terkoyak : Iluni UI). Akankah kita para mahasiswa sekarang kembali akan menjadi alat dan terprovokasi dengan isu-isu populis tertentu yang ternyata hanya menguntungkan kelompok tertentu dan jauh dari kepentingan riil masyarakat?

I. ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN

1. Dasar Organisasi

a. Definisi Organisasi

Dari mana kata organisasi berasal? Dan apa alasannya manusia berorganisasi? Sebagai seorang aktivis dan organisatoris, organisasi dan manajemen serta gaya kepemimpinan yang ada didalamnya harus dapat dipahami menentukan kelangsungan perjalanan organisasi tersebut. Bagaimana sebenarnya organisasi yang ideal? Sedikit mengantar dalam materi dasar manajemen organsasi.

Etimologi, organisasi berasal dari bahasa inggris Organization, yang diambil dari dua kata yaitu organ dan association. Organ yakni bagian, sedangkan association yakni perkumpulan. Jadi maksud dari organisasi ialah perkumpulan, perserikatan atau persatuan dari beberapa organ yang saling bekerja dan menunjang antara satu dengan yang lainnya.

Secara terminologi organisasi dapata diartikan sebagai berikut: suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut pola tertentu, sehingga setiap anggotanya memiliki fungsi dan tugas masing-masing,

utamanya lagi kesatuan tersebut mempunya batas-batas yang jelas sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya (Lubis daan Martin, 1989). Sekumpulan orang yang diarahkan untuk mencapai tujaan yang spesifik. Sekelompok manusia yang bekerja sama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

b. Model Organisasi

- Organisasi Terbuka
- Organisasi Tertutup
- Organisasi Model gabungan (Shyntetis)
- Jenis-jenis Organisasi:
    - Organisasi Lini
    - Organisasi Lini dan staf
    - Organisasi Fungsional
    - Organisasi Panitia

c. Karakteristik Organisasi

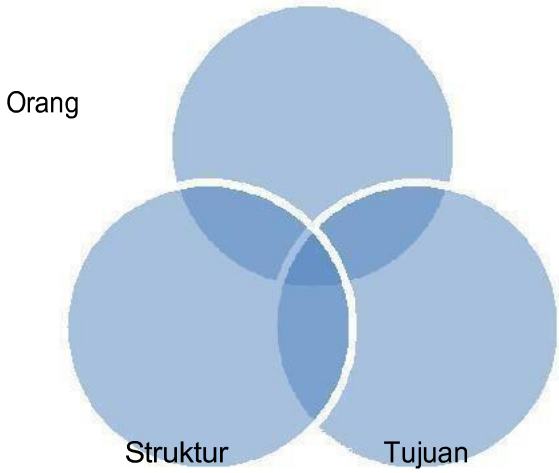

d. Prinsip-prinsip Organisasi

No.	Henry Fayol	Max Weber
1.	Pembagian Tugasdan Kerja	Kegiatan berbasis skill
2.	Kesatuan Pengarahan	Kesesuaian tugas dengan prosedur peraturan
3.	Sentralisasi	Tanggung jawab tugas
4.	Jenjang Organisasi	*Decision making* dibuat secara formal
5.		Tugas berdasar sistem kecakapan

e. Manajemen Organisasi

Definisi Manajemen Organisasi: Menurut Goerge R. Terry, salah satu pakar sosiologi dari Inggris, definisi dari manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menetapkan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam organisasi.

Prinsip-prinsip Manajemen:

- Adanya division of work
- Adanya authority
- Disiplin
- Kesatuan perintah
- Kesatuan pengarahan
- Kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi
- Pemberian rangsangan kerja
- Sentralisasi sebagian kekuasaan

- Garis wewenang jelas batasnya
- Tatanan yang baik

f. Pola Dasar dalam Manajemen Organisasi

Pada hakikatnya, dalam manajemen organisasi, ada empat unsur yang menjadi landasan dasar untuk menjalankan roda organisasi dengan baik dan benar, antara lain adalah:

- Planning : Perencanaan
- Organizing : Pengaturan
- Actuating : Pelaksanaan
- Controling : Pengawasan

Pola inilah yang kemudian kita kenal dengan sebutan POAC. Planning atau perencanaan, dalam organisasi berfungsi untuk memetakan arah gerak, pembentukan strategi, pembagian tugas, pembuatan program serta hal-hal lain yang terkait dengan tujuan organisasi tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan dan keinginan organisasi.

Organizing / pengaturan berfungsi untuk menata dan mengatur dari apa yang telah direncanakan oleh pelaku organisasi tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan rencana. Actuating / pelaksanaan adalah langkah selanjutnya setelah pengaturan, dimana pada tingkat ini, para pelaku organisasi diwajibkan untuk melaksanakan dan menjalankan segala apa yang telah diatur dalam perencanaan kerja agar tecapai dengan baik.

Controlling / pengawasan adalah langkah terahir setelah pelaku organisasi melakukan rangkaian langkah-langkah strategi diatas. Dengan tujuan dalam perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan dapat ditemukan fungsi kontrol dari pelaku organisasi bila dia menemukan kekliruan,

kesalahan, salah target ataupun berbagai macam kendala dalam organisasi tersebut.

2. Dasar Kepemimpinan

a. Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan berfikir atau merencanakan masa depan dengan bijak dan imajinatif Kepemiminan adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh pengikut. Pemimpin pada dasarnya adalah orang yang mampu menggerakan sumberdaya (terutama manusia) untuk bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah sebuah proses dimana seseorang tidak memperoleh pengikut karena karena status. Kemampuan seorang pemimpin dibuktikan pertama dari bagaimana dia mampu meyakinkan orang-orang yang dipimpinnya untuk memahami visi dan misi organisasi untuk kemudian mau bersama-sama mengupayakan tujuan organisasi tersebut.

Seseorang pemimpin berbeda dengan manajer. Pemimpin mempunyai kekuasaan atas pengikutnya bukan karena jabatannya tetapi karena kemapuan personality. Sikap, tingkah laku yang kemudian memunculkan wibawa. Sedangkan manajer memiliki kekuasaan karena jabatan yang dimilikinya. Dia bisa memberi komando karena struktur dan birokrasi, tetapi saat dia sudah tidak lagi menjabat maka tidak satupun “berkas” bawahannya mau diperintah.

Perbedaan mendasar antara pemimpin dan manajer adalah dari pola pikir dan cara bekerja. Seorang pemimpin memiliki visi jauh kedepan, sanggup mengadopsi perubahan, sedangkan manajer berfikir untuk jangka pendek. Dalam melaksanakan pekerjaannya pemimpin sangat fleksibel dan

tidak kaku sedangkan manajer melakukan apa yang telah digariskan, kaku dan enggan berubah.

Pemimpin inilah yang mendorong dan menggerkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi ini penting, sebab bagaiman pun juga baiknya perencanaan, tertibnya organisasi dan tepatnya penempatan orang dalam organisasi, belum berarti menjamin geraknya organisasi menuju sasaran dan tujuan, untuk itu diperlukan kecakapan, keulatan, pengalaman dan kesabaran.

Kemampuan untuk mempengaruhi dan gerakan orang lain guna mencapai tujuan tertentu ini disebut kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan sangat menetukan keberhasilan atas manajemen, dan lebih dari itu adalah menentukan keberhasilan administrasi. Ini bererti bahwa akan menentukan tercapainya atau tidaknya tujuan.

Dalam menggerakan orang lain kita harus ingat empat faktor, Yaitu: Pertama, kepemimpinan: kemampuan seseorang untuk mempengaruhi serta menggiatkan orang lain bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan. Kedua, komunikasi: cara dan media penyampaian pesan. Ketiga, instruksi: perintah atau petunjuk kerja yang jelas, tegas, tampak arahnya, jelas bagaimana jalan pelaksanaannya. Dan keempat, fasilitas: kemudian yang menyebabkan pekerjaan mudah dilaksanakan.

b. Tipe-Tipe Pemimpin

- **Pemimpin Konvesional**

  Anda tentu pernah mendengar ada sebutan “Tokoh Masyarakat” Mereka tidakpernahdiangkat secara formal tetapidiakui sebagai pimpinan dalam kelompoknya. Perkataannya didengar, Pemikirannya dijadikan rujukan. Pemimpin seperti ini biasanya dianggap sebagai panutan karena “kelebihan” yang

mereka miliki baik secara ilmu, fisik atau deraja tsosial. Biasanya konsep seperti ini ada pada masyarkat tradisional atau post tradisional.

- **Pemimpin Secara Ilmiah**

Pemimpin secara ilmiah terbagi menjadi 6, yaitu:

- Kepemimpinan Pribadi / Personal leadership yaitu tipe seorang pemimpin yang selalu mengadakan hubungan / interaksi langsung dengan para anggotanya.
- Kepemimpinan Non pribadi / non personal leadership yaitu kebalikan tipe kepemimpinan yang pribadi, tetapi melalui jenjang hierarchie organisasi yang sudah ditentukan.
- Kepemimpinan Otoriter, yaitu tipe pemimpin yang menanggap kepemimpinan adalah hak pribadinya, orang lain tidak ikut campur, sehingga setiap perintahnya tidak perlu konsultasi atau mendapat masukan dari anggotanya. Pemimpin berkuasa penuh, para pengikut tidak mendapat kesempatan mengemukakan pendapat.
- Kepemimpinan yang demokratis, yaitu tipe kepemimpinan yang selalu menerima dan menghargai saran pendapat, nasihat dari anggotanya.
- Kepemimpinan yang kebapakan atau paternalistis, yaitu tipe kepemimpinan yang bertindak sebagai ayah, pengasuh, pembimbing, serta pelindung dari anggota-anggotanya. Kelemahannya adalah sulit memberikan kepercayaan atau tanggung jawab secara penuh da nada rasa khawatir tidak berhasil.

- Kepemimpinan bebas, apa maunya atau laisesfaire, yaitu tipe kepemimpinan yang menonjolkan kebebasan, artinya pemimpin kurang menonjol dalam memimpin anggotanya dan diserahkan sepenuhnya kepada anggotanya untuk memecahkan persoalan dan tanggungjawabnya untuk menyerahkan sepenuhnya kepada bawahannya.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya seorang pemimpin harus memiliki dua aspek, yaitu: Pertama, aspek internal yaitu pemimpin harus mengetahui keadaan organisasi, gerak, tujuan serta keadaannya (pemimpin harus mempunyai pandangan organisasi, mengambil keputusan secara tepat, tegas dan mudah dilaksanakan, pandai mendelegasikan wewenang, mendapat dukungan dari anggotanya). Kedua, aspek eksternal yaitu pemimpin harus mengetahui situasi masyarakat diluar organisasi dan perkembangan organinsasi lain.

c. Kelebihan yang Perlu dimiliki Seorang Pemimpin

- Kelebihan rohaniah atau akhlak, seperti jujur, adil, percaya diri, ramah, dapat dipercaya atau bijaksana, kuat keyakinan beragamanya, sederhana, berjiwa besar, berbudi luhur, berani, dan lain sebagainya.
- Kelebihan jasmani, yaitu seperti berbadan kuat, sehat, terampil, tangkas, cepat, dan lain sebagainya.
- Kelebihan penggunaan nalar atau rasionalitasnya, yaitu cerdas, pandai, luas pandangannya, mampu melihat kedepan, inisiatif, kreatif, lancar berbicara dan lain sebagainya.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Seorang Pemimpin

- Mengantarkan atau mengarahkan, yaitu mempengaruhi dan membawa anggotanya kearah tujuan atau cita-cita yang sudah ditetapkan.
- Mengetahui artinya menempatkan diri sebagai seorang yang dituakan, diandalkan dan mencapatkan kepercayaan dari anggotanya untuk mengambil keputusan.
- Mempelopori atau merintis, yaitu menjadi pelopor, memberi contoh atau teladan untuk ditiru.
- Memberi petunjuk, nasihat, petuah agar pengikut-pengikutnya bertindak dan bersikap benar.
- Memberi bimbingan agar anggotanya maju dalam usaha atau pekerjaannya, tidak putus asa dan berani bertindak.
- Membina guna meningkatkan pengetahuan keterampilan anggotanya.
- Menggerakkan, yaitu memberikan dorongan kepada anggotanya agar mau bekerja dan mau berusaha mencapai tujuan atau cita- cita.

3. Teknik Persidangan

a. Definisi Teoritis

Sidang adalah suatu pertemuan formil yang terdiri dari beberapa orang atau kelompok guna membicarakan suatu masaslah dan berupaya mencari jalan keluar yang diwujudkan dalam suatu keputusan yang disepakati bersama-sama oleh para peserta sidang dan telah disahkan oleh pimpinan sidang.

Sidang atau persidangan adalah salah satu kelengkapan organisasi yang mutlak harus dimiliki oleh setiap organisasi dimanapun dan apapun, karena ditangan ditentukan. Melalui sidang pulalah baik buruknya sebuah laju organisasi dapat dievaluasi, sehingga lazimnya bagi sebuah organisasi, sidang memiliki kekuatan hukum tertinggi dibandingkan dengan kelengkapan organisasi yang lainnya.

b. Manfaat sidang

- Memberikanjalan keluaryangdisepakatibersama
- Melatih kedewasaan dalam memberikan pendapat
- Melatih untuk menghormati pendapat orang lain

c. Tujuan sidang

- Mencari jalan keluar atas masalah yang terjadi,
- Mencari kesepakatan bersama bagi peserta sidang.

Esensi pembahasan antara sidang, rapat, dan musyawarah merupakan arti yang sama yaitu membahas suatu masalah akan tetapi fungsi dan kegunaannya ssangat berbeda yaitu terletak pada pokok bahasan yang dipermasalahkan serta mekanisme yang digunakan.

d. Kelengkapan Sidang

- Pimpinan Sidang

Pimpinan sidang adalah orang yang bertindak memimpin persidangan, ia wajib mengatur jalannya persidangan. Seorang pemimpin sidang dituntut untuk bersikap adil dan bijaksana dalam menyikapi pendapat-pendapat yang berkembang dalam persidangan. Ditangannya lah kesepakatan-kesepakatan dalam persidangan ditetapkan. Jumlah pimpinan sidang haruslah berjumlah ganjil karena adakalanya forum membutuhkan suara pimpinan sidang dalam pengambilan keputusan, jumlah minimal orang dan sesuai kesepakatan peserta sidang. Pimpinan sidang memiliki hak yang sama dengan peserta sidang.

- Peserta Sidang

Peserta sidang adalah orang yang memiliki kepentingan untuk bersidang, berkewajiban untuk mengikuti dan menjaga kelancaran jalannya persidangan (menaati tata tertib). Peserta sidang berhak mengajukan pertanyaan, pernyataan, penolakan dan meminta penjelasan, klarifikasi mengenai sesuatu. Selain itu peserta sidang berhak pula untuk menggunakan suaranya dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain segala sesuatu dapat terjadi dalam persidangan asalkan kesepakatan peserta sidang karena segala keputusan ada di tangan peserta sidang.

- Peninjau

Peninjau adalah orang yang hadir dalam persidangan kecuali peserta dan pimpinan sidang. Peninjau memiliki kewajiban yang sama dengan peserta sidang. Peninjau memiliki hak yang sama dengan peserta sidang. Tetapi peninjau tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam pengambilan keputusan.

- Palu Sidang

Palu sidang adalah palu yang digunakan untuk menetapkan suatu keputusan, palu sidang merupakan nyawa dari persidangan, karena walaupun keputusan telah

disepakati, tidak akan sah apabila tidak ada palu sidang untuk menetapkannya.

- Draft Sidang

Draft sidang adalah draft yang berisi permasalahan-permasalahan dan bahan yang akan dibahas dalam persidangan. Biasanya terdiri dari draft tata tertib, AD/ART, PO, GBHPK, dll yang disusun sebelumnya oleh tim perumus sidang atau panitia khusus.

- Konsideran

Lembar konsideran adalah kertas yang berisi lembaran keputusan-keputusan apa saja yang akan diambil dalam persidangan. Namun, selain hal-hal yang akan diatas masih ada beberapa kelengkapan yang diperlukan dalam persidangan seperti ruangan, kursi, meja taplak serta kelengkapan lain yang dibutuhkan.

- Quorum dan Pengambilan Keputusan

Quorum adalah syarat sahnya sidang untuk dapat diadakan, karena tingkat quorum Menunjukan sejauh mana tingkat reoresentasi dari peserta sidang. Semakin tinggi jumlah quorum, semakin tinggi juga jumlah representasi sidang tersebut. Persidangan dinyatakan sah / quorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ + 1 dari peserta yang terdaftar pada panitia (bisa juga ditentukan dari konsensus). Setiap keputusan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak berhasil diambil melalui suara terbamyak (1/2 +1) dari peserta yang hadir di persidangan. Bila dalam pengambilan keputusan melalui suara terbanyak terjadi suara seimbang, maka dilakukan lobbying sebelum melakukan pemungutan suara ulang sampai menemukan selisih.

- Notulensi

Bertugas untuk mencatat jalannya persidangan. Mencatat setiap usulan dan keputusan serta merekapitulasi catatan sidang. Biasa ditugaskan pada presidium sidang III atau petugas khusus.

e. Kategori Sidang

- Sidang Paripurna

Sidang paripurna adalah sidang yang dihadiri oleh semua jajaran/staf suatu organisasi, atau lembaga yang diadakan sesuatu dengan masa jabatan yang telah ditentukan.

- Fungsi Sidang Paripurna:

- Mendengar dan menyerahkan laporan pengurus yang telah usai masa jabatan yang telah ditentukan.
- Menyatakan Demisioner penguruspada periode bersangkutan.
- Menyerahkan Anggaran dasar dan Rumah Tangga.

- Sidang Pleno

Sidang pleno adalah sidang yang dihadiri oleh semua pengurus suatu organisasi dan sekurang-kurangnya 3 (Tiga) bulan sekali.

- Fungsi Sidang Pleno:

- Menganbil kebijakan-kebijakan yang mendasar pada tubuh organisasi.
- Menyusun dan merivisi program kerja.
- Mendengarkan dan membahas laporan ketua-ketua departemen.

- Sidang Komisi

Sidang komisi ialah sidang yang dihadiri oleh ketua komisi, ketua bidang dan seluruh pengurus yang bersangkutan dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

- Fungsi Sidang Komisi:

- Menunjuk dan menetapkan pelaksanaan program
- Menyusun langkah dan strategi untuk melakukan kebijakan yang telah ditetapkan.

f. Bentuk Ketukan Palu Sidang

- Ketukan digunakan pada:

Keputusan sela,

Kesepakatan,

Ketukan oleh pemimpin sidang atau majelis ketua yang akan melanjutkan dalam pengambilan alih sidang (Terjadi pada pergantian pemimpin sidang / Majelis ketua).

- Ketukan. Digunakan pada:

Menskorsing atau mencabut Skorsing

Mencabut kembali Kesepakatan terdahulu yang dianggap keliru (PK), Pada pergantian pimpinan sidang sementara oleh pimpinan sidang tetap atau pimpinan sidang 1 oleh pimpinan sidang 2.

- Ketukan. Digunakan pada:

Pembukaan dan penutupan sidang,

Mengesahkan keputusan/konsideran final / akhir sidang.

g. Contoh Kalimat yang dipakai oleh Pimpinan Sidang

- Membuka sidang :

“Bismillahirrahmanirrahim, Dengan ini nyatakan sidang… (nama sidang/forum) …… dibuka/dimulai”

- Menutup sidang :

"Dengan mengucap *alhamdulilahirabbil'alamin*", dengan ini sidang ditutup/selesai".

- Mengalihkan pimpinan sidang :

"Dengan ini saya serahkan palu sidang kepada presidium sidang terpilih/ presidium".

- Mengambil alih pimpinan sidang :

"Palu Sidang saya terima palu sidang, sidang dilanjutkan".

- Menskorsing sidang :

"Dengan ini sidang saya skorsing selama…. (Waktu yang ditentukan)".

J. ATRIBUT PMII DAN LAGU-LAGU PERGERAKAN

1. Lambang PMII

Pencipta Lambang: H. Said Budairi

a. Makna Bentuk:

Perisai : Berarti ketahanan dan kemampuan mahasiswa Islam terhadapberbagai tantangan dan pengaruh dari luar

Bintang : Adalah lambang ketinggian dan semangat cita-cita yangselalu memancar

Lima Bintang : Sebelah atas menggambarkan rasulullah dengan 4 sahabat terkemuka (khalifatul rasyidin)

Empat Bintang : Sebelah bawah menggambarkan 4 mazhab yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah.

Sembilan Bintang : Sebagai jumlah bintang keseluruhan dalam lambang dapat berarti ganda, yaitu rasulullah dengan 4 orang sahabat serta 4 mazhab itu laksana bintang yang selalu bebrsinar cemerlang, mempunyai kedudukan tinggi serta penerang umat manusia. Sembilan orang pemuka penyebaran agama Islam di Indonesia yang disebut walisongo.

b. Makna Warna

BIRU : Sebagaimana warna tulisan PMII berarti kedalaman ilmu pengetahuan yang harus dimiliki dan harus digali oleh warga pergerakan. Biru juga menggambarkan lautan Indonesia yang mengelilingi kepulauan Indonesia dan merupakan kawasan nusantara

BIRU MUDA **:** Sebagai warna dasar perisai sebelah bawah berarti ketinggian ilmu pengetahuan, budi pekerti dan takwa

KUNING **:** Sebagai warna perisai sebelah atas berarti identitas kemahasiswaan yang menjadi sifat dasar pergerakan, lambang kebesaran, dan semangat yang selalu menyala, serta pengharapan menyongsong masa depan

c. Penggunaan:

Lambang digunakan dalam papan nama, bendera, kop surat, stempel, badge, kta PMII, dan benda atau tempat tempat lain yang tujuannya untuk menunjukan identitas organisasi.

2. Bendera PMII

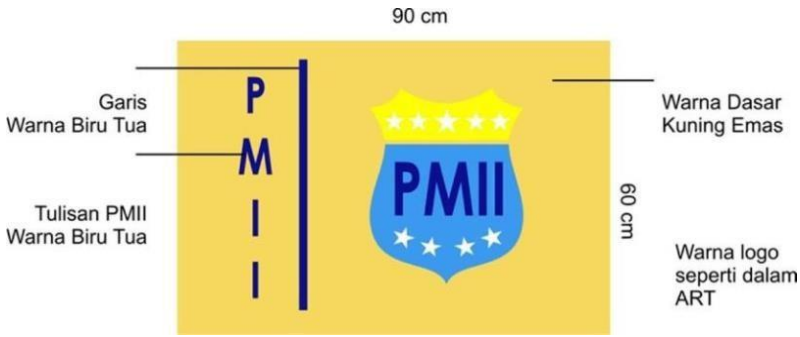

Pencipta Bendera: Shaimory W.S.

Ukuran : Panjang x Lebar = 4 x 3

Warna Dasar : Kuning

Isi : Lambang PMII terletak pada bagian tengah. Tulisan PMII terletakpada sebelah kiri, lambangmembujur ke

bawah

Penggunaan : Bendera digunakan pada upacara-upacara resmi organisasi, baik internal maupun eksternal dan upacara nasional. Penempatannya diletakkan di depan tempat upacara dan di sebelah kiri bendera kebangsaan

3. Lagu-Lagu Pergerakan

Lagu-lagu dibawah ini adalah lagu-lagu yang menjadi wajib bagi warga pergerakan dalam setiap aktivitasgeraknya, beberapa lagu PMII dan beberapa lagu lainnya merupakan lagu gerakan mahasiswa secara nasional.

a. Mars PMII

Inilah kami wahai Indonesia
Satu barisan dan satu cita
Pembela bangsa penegak agama
Tangan terkepal dan maju kemuka

Habislah sudah masa yang suram
Selesai sudah derita yang lama
Bangsa yang jaya, Islam yang benar
Bangun tersentak dari bumiku subur

Reff:
Denganmu PMII, Pergerakanku Ilmu dan bakti, kuberikan
Adil dan makmur kuperjuangkan

Untukmu satu tanah air ku

Untukmu satu keyakinanku

Inilah kami wahai Indonesia

Satu angkatan dan satu jiwa

Putera bangsa bebas merdeka

Tangan terkepal dan maju ke muka

Pencipta lagu : Shimory Syair : H. Mahbub Juanaidi

Penggunaan : Mars PMII dilagukan pada pembukaan acara resmi organisasi, baik bersifat intern maupun ekstern maupun umum. Mars PMII dilagukan secara bersama- sama beridiri tegak, khidmat, penuh semangat.

b. Hymne PMII

Bersemilah, bersemilah, Tunas PMII

Tumbuh subur, tumbuh subur kader PMII

Masa depan, ditanganmu Untuk, meneruskan perjuangan

Bersemilah, bersemilah

Kau harapan bangsa

Pencipta : Anonim

Penggunaan : Lagu Hymne di PMII ini digunakan pada saat acara formal seperti pelantikan pengurus PMII diberbagai tingkatan dan pelantikan anggota dan kader PMII dalam kaderisasi formal.

c. Berjuanglah

Berjuanglah PMII berjuang

Marilah kita bina persatuan 2x

Hancur leburlah angkara murka Perkokohlah barisan kita, siaap!!

Sinar api Islam kini menyala

Tekad bulat jihad kita membara 2x

Berjuanglah PMII berjuang

Menegak kan kalimat tuhan

Penggunaan : lagu ini digunakan pada setiap agenda semi formal ataupun non formal PMII.

d. 17 APRIL

Akulah embun tetesan tradisi,

Melawan matahari pecipta pelangi

Akulah puja, tetesan sang wali

Melumat kata, menumbuk duri

Engkau adalah, mata air suci

Bertahan iring arus globalisasi

Engkau adalah Bintang pemimpin negri

Bekerja tabuh genderang demokrasi

Wahai sejarah saksikan kami tegak berdiri

Damaikan samudra meluluhkan tirani

Hikmatku untuk rakyat dan illahi
Demi pertarungan yang kita perangi
Dan pertempuran yang belum kita jalani

Pencipta : Mansur Al-Farisi (Bang Pacun)

e. Bandung

Bandung, lautan api

Aku ke bandung naik kereta api

Bandung lautan api
Aku ke bandung oh tidak sendiri

Ku ciumi tanah parahiyangan
Ku hirupi dingin angin malam kota kembang
Kutanamkan darah seniku di sana
Di pelukmu bandung

Reff:
Melayang-layang 2x
Ku coba melawan deras kota kembang
Melayang-layang 2x
Kini ku mendapat gelar anak rantau
Mau tak mau aku harus bantu bapak
Bapak ku yang bukan pengusaha
Mau tak mau aku harus bantu ibu
Ibuku bukan wanita karir
Keluargaku, titisan orang susah.. Bandung..

Pencipta : Mansur Al-Farisi (Bang Pacun)

f. Ya Lal Wathon

يَا لَلْوَطَنْ يَا لَلْوَطَن يَا لَلْوَطَنْ
Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon

حُبُّ الْوَطَنْ مِنَ ٱلإِيمَانْ
Hubbul wathon minal iman

وَلاتَكُنْ مِنَ الْحِرْمَانْ
Wala takun minal Hirman

اِنْهَضُوا أَهْلَ الْوَطَنْ
Inhadlu alal wathon

اِندُونيْسِيَا بِلاَدى
Indonesia biladi

أَنْتَ عُنْوَانُ الْفَخَامَا
Anta 'unwanul fakhoma

كُلُّ مَنْ يَأْتِيْكَ يَوْمَا
Kullu may ya'tika yauma

طَامِحاً يَلْقَ حِمَامًا
Thomihay yalqo himama

Pusaka Hati Wahai Tanah Airku
Cintamu dalam Imanku
Jangan Halangkan Nasibmu
Bangkitlah Hai Bangsaku

Pusaka Hati Wahai Tanah Airku
Cintamu dalam Imanku
Jangan Halangkan Nasibmu
Bangkitlah Hai Bangsaku

Indonesia Negeriku
Engkau Panji Martabatku
Siapa Datang Mengancammu
Kan Binasa di bawah durimu
Siapa Datang Mengancammu
Kan Binasa di bawah durimu

Pencipta : KH Wahab Hasbullah tahun 1934.

SUSUNAN PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM CIPUTAT MASA KHIDMAT 2023 - 2024

1. **MAJELIS PEMBINA CABANG**

Ketua : Abdurahman Wahid
Sekretaris : Fahmi Dzakky
Anggota : Ramadhan
: Ahmad Misabahul Munir

2. **BADAN PENGURUS HARIAN (BPH)**

Ketua	**: Khairul Umam**
Wakil Ketua I	**:** Humnatul Haniyah
Wakil Ketua II	**:** Adiv Irvan
Wakil Ketua III	**:** Muhammad Naufal
Sekretaris	**: Fernaldi Anggadha**
Wakil Sekretaris I	**:** Ihsanul Fajri
Wakil Sekretaris II	**:** Afif Alfain Thufail
Wakil Sekretaris III	**:** Wafi Muttahid
Bendahara	**: Abie Dzikri Charamulloh**

Wakil Bendahara **:** Azka Maulana

3. BIRO-BIRO

Bidang I Internal

Biro Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Anggota

Koordinator : Syahrul Yudistira

Anggota : Faiza Durrun Nafis

: Muh. Nasrullah T.

Biro Pendayagunaan Potensi dan Kelembagaan Organisasi

Koordinator : Arifuddin Noor Zaky

Anggota : Satya Graha Babibilah

Biro Kajian Pengembangan Intelektual dan Eskplorasi Teknologi

Koordinator : Ma'ruf Anshori

Anggota : Qolbun Salim

: Tubagus Hidayat Aulia Rohman

Biro Pemberdayaan Ekonomi dan Kelompok Profesional

Koordinator : Fajar Insani

Anggota : Muhammad Nur Hidayatulloh

Bidang II Eksternal

Biro Hubungan, Komunikasi Pemerintah dan Kebijakan Publik

Koordinator **:** Alfandy Agham

Anggota **:** Mohammad Rafdi Syawaldin

Biro Hubungan Komunikasi Organ Gerakan, Kepemudaan dan Perguruan Tinggi

Koordinator : Muhammad Bin Zein Alhasni

Anggota : Hikmah Marfita Sari

Biro Pengembangan Media dan Informasi

Koordinator : Muhammad Luthfi Arsalani

Anggota : Rini Endria Lestari

Biro Hubungan dan Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat

Koordinator : M. Reza Fauzi

Anggota : Fuad Afdhal

: Ahmad Faqih

Bidang III Keagamaan

Biro Dakwah, Kajian Islam, dan Hubungan AntarAgama

Koordinator : Raka Chaesar Wardani

Sekretaris : Muhammad Zidan

Biro Komunikasi dan Hubungna Pesantren

Koordinatror : Wildan Rahmat Hidayat

Anggota : Hidayat Sangputra

: Gerald Halim Al Rasyid Noer

Biro Pengurus Asrama dan Sekretariat

Koordinator : Ahdimas Husnun Khotami

Anggota : Sofia Isti Azelia

TUJUAN PMII :

Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa
kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab
dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen
memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.